

## BAB IV

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini penulis akan coba menyimpulkan bingkai berita pernyataan Mendagri terkait aspirasi warga DIY pendukung penetapan kepala daerah. Setelah melakukan analisis pada level teks dan konteks, penulis menemukan *frame* berita Kompas.

Pada analisis level teks, penulis menggunakan 4 teks berita dan melakukan analisis menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki meliputi; sintaksis, striptural, tematik, dan retorik. Menggunakan perangkat framing tersebut, penulis dapat menemukan realitas yang dibingkai oleh Kompas dalam pemberitaannya. Di level konteks, penulis melakukan wawancara dengan Bambang Sigap Sumantri sebagai editor multimedia yang sebelumnya menjadi kepala biro bagian Yogyakarta. Wawancara juga dilakukan dengan Mawar Kusuma, wartawan yang secara langsung terjun dan meliput berita.

*Frame* besar pertama Kompas yang ditemukan yaitu pernyataan Mendagri dinilai kurang dapat menghargai aspirasi warga DIY walaupun masih dianggap sebagai suatu pernyataan wajar. Menurut narasumber yang ditampilkan oleh Kompas menunjukkan sikap kekecewaan dalam menanggapi pernyataan Mendagri yang memberikan kesan kurang menghargai dan memperhatikan aspirasi warga pendukung penetapan. Kompas juga menonjolkan beberapa pernyataan yang memuat wacana warga yang terpancing emosinya. Hal ini diperjelas dalam temuan penulis dengan wawancara pada level konteks. Sigap mengatakan bahwa pendapat Mendagri merupakan sesuatu hal yang wajar. Logikanya pernyataan Mendagri itu ada benarnya, karena tidak semua warga DIY bisa hadir di DPRD DIY dan mendukung penetapan kepala daerah. Selain itu penulis juga

menemukan hal yang bisa dipakai untuk menyeimbangkan frame yang dibingkai Kompas. Melalui wawancara *by email* dengan Mawar Kusuma, penulis menemukan penilaian wartawan yang mengatakan secara terus terang mengatakan bahwa pernyataan Mendagri yang *ceplas ceplos* dapat disalahkan karena dapat melukai hati rakyat Yogyakarta.

*Frame* besar kedua yang ditemukan penulis adalah reaksi warga DIY terhadap pernyataan Mendagri yang bersifat ekspresif. Pernyataan Mendagri bisa memicu emosi warga yang kecewa aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah pusat. Namun, seperti diungkapkan oleh Mawar dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa reaksi warga DIY kala itu wajar, emosi warga juga tidak sampai anarkis. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sigap bahwa di Jogja tidak ada sejarah anarkis. Warga Jogja lebih tepatnya menanggapi secara lebih ekspresif bukan anarkis. Hal ini sebagai bentuk luapan emosi dan kekecewaan. Jadi, yang memancing emosi warga hanya karena keterlibatan emosional karena di Jogja faktor sejarah masih lekat.

Sedangkan untuk *frame* ketiga yang ditemukan penulis pada level konteks seperti dikutip dalam pernyataan Sigap yaitu,

*“Sultan kok malah manut, sudah jelas-jelas suara Jogja juga sudah bulat menginginkan penetapan.”*

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan narasumber lain yang terkesan menyalahkan Mendagri. Hasil wawancara dengan Sigap mengungkap bahwa aspek politis Sultan lemah sehingga untuk maju dan membela warga DIY masih mudah untuk dijatuhkan. Mawar dalam pernyataannya memperkuat pendapat Sigap bahwa menurutnya jika Sultan bisa memperjuangkan kembali nasib keistimewaan DIY karena dipandang sebagai jembatan antara warga dengan pemerintah pusat. Polemik tidak akan berlarut-larut tanpa kepastian dari pemerintah.

Kompas sebagai media yang menjalankan fungsi kontrol memosisikan diri menyuarakan

suara rakyat DIY dan di sisi lain memberi ruang bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan pandangannya.

Posisi Kompas mengingatkan pemerintah agar selalu bertindak *fair* kepada masyarakat termasuk kepada daerah, masyarakat dan pemerintah DIY. Dalam isu keistimewaan Yogyakarta, sikap Kompas selalu mengingatkan kepada pemerintah supaya berjalan pada alur yang tidak bias karena politik golongan atau dendam pribadi. (Bambang Sigap, Editor multimedia *Kompas* dalam wawancara pada tanggal 20 Juli 2011)

Penulis melihat bahwa pemberitaan yang ditulis oleh Kompas masih dipengaruhi oleh faktor internal dalam media. Pemimpin redaksi sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan arah pemberitaan sehingga pekerja media tidak bisa memasukkan pandangan pribadinya dalam teks.

Kompas tidak melakukan penonjolan, khususnya mengenai kurangnya peran Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam mendukung aspirasi warga DIY pendukung penetapan Gubernur DIY. Pemberitaan Kompas justru menyalahkan Mendagri terkait pernyataannya mengenai aspirasi warga pendukung penetapan yang kurang dihargai dan didengarkan oleh pemerintah pusat. SKH Kompas menonjolkannya dengan mengangkat pendapat narasumber yang menganggap pernyataan Mendagri kurang menghargai aspirasi warga DIY.

## **B. Saran**

Dalam melakukan analisis berita pernyataan Mendagri di Kompas, penulis menemukan beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Keterlibatan penulis dalam penelitian ini disebabkan karena penulis ingin lebih mengetahui korelasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan media massa sebagai penghubung diantaranya. Kompas memiliki relasi yang baik dengan semua narasumber, jadi terkait pemaparan berita Kompas terlihat netral. Mengenai nasib keistimewaan yang terkesan berlarut-larut ada baiknya Kompas menampilkan dari sudut pandang pemerintah

Yogyakarta sendiri yang kurang mendapatkan perhatian khusus perihal sikapnya dalam mendukung aspirasi warganya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan model perangkat framing dari Zhongdang Pan dan Kosicki. Penulis melihat bahwa penelitian ini tidak menutup kemungkinan diteliti dengan menggunakan model yang lain yaitu model dari Robert N. Etnman atau William A. Gamson. Peneliti hanya melihat frame dari satu media saja yaitu Kompas. Banyak hal yang bisa ditemukan penulis dalam menggali pernyataan Mendagri terkait dukungan aspirasi warga pendukung penetapan kepala daerah bila dibandingkan dengan media lain. Selain itu penelitian ini dapat dilakukan dengan metode penelitian sosiologis yang menitikberatkan pada perilaku sosiologis warga DIY terkait dengan pemberitaan pernyataan Mendagri terkait aspirasi warga DIY pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LkiS
- Fiske, John. 1990. *Intoduction to Communication Studies*. Second Edition. London New York: Routledge.
- Hammad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Edisi Pertama. Jakarta: Geanit.
- Kriyantono, Rachmad. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyana, Dedy. 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press
- Rakhmad, Jallaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Obor.
- Santosa, FA. *Makalah: Sejarah, Organisasi, dan Visi Misi*. Jakarta
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sudibyoy, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS

## **TULISAN TIDAK DITERBITKAN**

Pinandhita, B. Satrio. 2010. Framing terhadap berita film Fitna pada Majalah Tempo periode Maret-April 2008. (*Studi Analisis Framing terhadap berita film Fitna pada Majalah Tempo periode Maret-April 2008*) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Sibarani, Kartini Rolitta. 2010. Framing pemberitaan rencana penutupan lokalisasi Lembah Harapan Baru KM. 17 Balikpapan pada SKH Kaltim Post. (*Analisis Framing pemberitaan rencana penutupan lokalisasi Lembah Harapan Baru KM. 17 Balikpapan pada SKH Kaltim Post*). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

## KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

# Ribuan Orang Akan Hadiri Sidang Paripurna

YOGYAKARTA, KOMPAS — Ribuan warga Yogyakarta diperkirakan akan menghadiri Sidang Paripurna DPRD DIY yang akan menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Senin (13/12). Sidang merupakan wujud dukungan rakyat terhadap keistimewaan DIY yang menginginkan penetapan gubernur dan wakil gubernur, bukan pemilihan seperti di wacanakan pemerintah pusat.

"Berbagai elemen warga akan menghadiri rapat paripurna itu. Jumlahnya kemungkinan bisa mencapai 10.000 orang," kata pemimpin Gerakan Rakyat Mataran (Geram) Widiasto Wasana Putra saat dihubungi hari Minggu.

Widiasto menambahkan, bukan hanya warga DIY yang akan turut dalam aksi itu, melainkan juga warga luar Yogyakarta yang berdomisili di DIY. Mereka sudah menyatakan akan ikut serta. "Kami menerima kabar 60 warga Papua dan Nusa Tenggara Timur yang berada di Yogyakarta akan berpartisipasi juga dalam pawai nanti," ujarnya.

Sebelum menghadiri sidang paripurna itu, Widiasto mengatakan, pihaknya akan menggelar proses *tirto purwito sari* atau pengambilan mata air dari Gunung Merapi dan Pantai Selatan. "Kedua mata air itu lalu akan disatukan," katanya.

Dua mata air dari simbol dua pangkal garis imajiner sakral Keraton Yogyakarta itu sebagai wujud doa mendukung penetapan. Mata air suci itu juga dimaksudkan sebagai simbol bersatunya rakyat dari berbagai penjurur dalam mendukung keistimewaan DIY.

Geram juga menyerukan kepada semua warga DIY untuk menghadiri sidang paripurna yang akan berlangsung mulai pukul 12.00. Semua warga, pemilik toko, sekolah, perguruan tinggi, pasar, dan kantor swasta agar menghentikan aktivitasnya selama satu hari guna menjadi saksi ditegakkannya kedaulatan keistimewaan DIY itu.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ing Sedyo Memetri Asrining Yogyakarta (Ismaya) DIY Mulyadi mengatakan, pihaknya akan mengerahkan 15.000 orang. Mulyadi mengatakan, inti kehadiran mereka adalah untuk menunjukkan bahwa dukungan terhadap penetapan memang aspirasi warga DIY.

### Setengah tiang

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto di kediaman pribadinya mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang sebagai wujud keprihatinan bahwa masalah RUU Keistimewaan DIY ini telah menimbulkan gejala perpecahan bangsa Indonesia.

Ia mengimbau warga Kota Yogyakarta untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama seminggu penuh. Tentang pengibaran bendera setengah tiang itu, Mulyadi menganggap sebagai hal bagus sebagai penguatan bahwa warga Yogyakarta benar-benar melihat pemerintah pusat yang tak mendengarkan aspirasi rakyat. "Pusat agar tabu," katanya.

Sementara itu, sesuai pelantikan pengurus dan cabang kepengurusan organisasi massa Nasional Demokrat di Wilayah DKI Jakarta, kemarin, Ketua Umum

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

# Ribuan Orang Akan Hadiri Sidang Paripurna

(Sambungan dari halaman 1)

Nasional Demokrat Surya Paloh menyatakan, polemik tentang keistimewaan Yogyakarta muncul salah satunya karena Presiden keburu berkomentar. "Kalau Presiden tidak komentar, mungkin tidak akan muncul polemik," ujarnya.

Menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan, Nasional Demokrat mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY secara langsung. Hal ini sejalan dengan proses

yang telah berlangsung sejak proses kemerdekaan.

Ferry juga mengatakan, sejumlah aktivis Nasional Demokrat dari Jakarta akan terbang ke Yogyakarta untuk hadir dalam sidang paripurna itu.

Surya Paloh menandatangani agar polemik dihentikan. "Kalau memang daerah istimewa lebih menjamin persatuan, ya saya pilih persatuan," kata Surya Paloh.

Sebelumnya diberitakan, dukungan terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY terus mengalir. Tokoh masyarakat adat Mimika, Papua, yang juga mantan Ketua DPRD Ti-

mika, Yopi Kilangin, mewakili masyarakat Papua mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Yopi menemui Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X untuk menyampaikan dukungan warga Mimika terhadap keistimewaan DIY di Kantor Gubernur DIY. Ia juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan keistimewaan DIY dengan bertemu perwakilan paguyuban lurah dan dukuh DIY.

Menurut Yopi, RUU Keisti-

mewaan DIY jangan sampai melenceng dari aspirasi warga DIY dan sistem pemerintahan yang berjalan di DIY selama ini. "Kami di Papua sangat mendukung perjuangan warga DIY," ujarnya, Sabtu lalu.

Yopi menambahkan, RUU Keistimewaan DIY cukup mengganggu sistem yang berjalan di DIY. Warga Papua yang selama ini merasa dianaktirikan pemerintah pusat pun terkejut karena ternyata DIY sebagai "anak sulung" Negara Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat.

(RWN/WKM/EDN/ENG/PRA)

13 Desember 2016

**“Ribuan Orang Akan Hadiri Sidang Paripurna”**

| ANALISIS SELEKSI   |   |
|--|---|
| STRUKTUR SKRIPTURAL  | STRUKTUR TEMATIS  |
| <p><b>Realitas:</b></p> <p>Ribuan warga Yogyakarta diperkirakan akan menghadiri Sidang Paripurna DPRD DIY pada Hari Senin (13/12).</p> <p>Sidang merupakan wujud dukungan rakyat terhadap keistimewaan DIY yang menginginkan penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY, bukan pemilihan seperti diwacanakan pemerintah pusat.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Herry Zudianto</li></ol> <p>Dalam wacana, Herry Zudianto sebagai Wali Kota Yogyakarta menyatakan dukungan penetapan keistimewaan DIY dengan mengibarkan bendera setengah tiang di kediamannya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Susilo Bambang Yudhoyo</li></ol> | <p><b>Wacana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penjelasan awal merupakan wacana dukungan ribuan warga Yogyakarta yang akan menghadiri Sidang paripurna DPRD DIY pada Hari Senin (13/12). (Paragraf 2, Paragraf 7,)</li><li>Penjelasan mengenai kekecewaan tokoh masyarakat pada sikap pemerintah.</li></ol> <p><b>Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Widihasto Wasana Putra (Pemimpin Gerakan Rakyat Mataram (Geram))<br/>“Berbagai elemen warga akan menghadiri rapat paripurna itu. Jumlahnya kemungkinan bisa mencapai 10.000 orang.”<br/>(Paragraf 2)</li><li>Mulyadi Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ing Sedyo Memetri Asrining Yogyakarta (Ismaya)<br/>“Pihaknya akan mengerahkan 15.000</li></ol> |

Presiden Republik Indonesia dimunculkan karena komentarnya mengenai keistimewaan Yogyakarta yang memunculkan polemik.

### 3. Ferry Mursyidan Baldan

Dalam wacana, Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Nasional Demokrat dalam wacana menyebutkan dukungan sejumlah aktivis Nasional Demokrat yang hadir dalam sidang paripurna.

#### **Pelantun Wacana:**

#### 1. Widihasto Wasana Putra

Pelantun diatas merupakan pemimpin Gerakan Rakyat Mataram (Geram) yang mengatakan bahwa berbagai elemen warga mengikuti jalannya sidang paripurna.

Pernyataan ini terdapat dalam paragraf 3: **“Bukan hanya warga DIY yang akan mengikuti jalannya sidang tetapi juga warga luar Yogyakarta yang berdomisili di Yogyakarta. Mereka menyatakan akan ikut serta.”**

Ia juga mengatakan bahwa Geram

orang.”

(Paragraf 7)

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa ribuan warga akan hadir dalam sidang paripurna DPRD DIY. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap penetapan yang memang merupakan aspirasi warga DIY.

#### **Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh:**

#### 1. Surya Paloh (Ketua Umum Nasional Demokrat)

“Kalau Presiden tidak komentar, mungkin tidak akan muncul polemik.”

(Paragraf 10)

#### 2. Herry Zudianto (Wali Kota Yogyakarta)

“Pusat agar tahu.”

(paragraf 8)

#### 3. Yopi Kilangin (Tokoh masyarakat adat Timika)

“DIY sebagai “anak sulung” Negara Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat.”

(paragraf 17)

Dalam pernyataan-pernyataan tersebut

menyerukan pada semua warga DIY untuk mengikuti jalannya sidang dan menghentikan aktifitasnya selama satu hari guna menjadi saksi kedaulatan keistimewaan DIY.

2. Mulyadi

Dalam wacana diatas, pelantun merupakan Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ing Sedyo Memetri Asrining Yogyakarta (Ismaya) yang mendukung penetapan dengan mengerahkan 15.000 orang.

**“Inti kehadiran mereka adalah untuk menunjukkan bahwa dukungan terhadap penetapan memang aspirasi warga DIY.”** (paragraf 7)

3. Herry Zudianto

Pelantun dalam wacana merupakan Wali Kota Yogyakarta yang menghimbau warga untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama seminggu penuh.

**“Pusat agar tahu.”** (paragraf 8)

4. Surya Paloh

Surya Paloh merupakan Ketua Umum Nasional Demokrat yang mengatakan

dapat terlihat bahwa tokoh masyarakat kecewa dengan sikap pemerintah yang mengabaikan aspirasi warga DIY terkait RUU Keistimewaan.

pemerintah terlalu cepat memberikan komentar.

**“Kalau Presiden tidak komentar, mungkin tidak akan muncul polemik.”** (Paragraf 10)

5. Yopi Kilangin

Tokoh masyarakat adat Mimika, Papua ini dimunculkan dalam wacana untuk mewakili dukungan masyarakat Papua yang mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Ia juga menyatakan RUU Keistimewaan jangan sampai melenceng dari aspirasi warga DIY dan sistem pemerintahan yang berjalan selama ini. Pernyataannya dikuatkan dalam paragraf 16.

**“Kami di Papua sangat mendukung perjuangan warga DIY.”**

*Frame* Seleksi: Ribuan warga Yogyakarta dari berbagai elemen masyarakat akan menghadiri Sidang Paripurna DPRD DIY sebagai bentuk aspirasi dukungan penetaan Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY.

## ANALISIS SALIANSI

| STRUKTUR SINTAKSIS  | STRUKTUR RETORIS   |
|---|--|
| <p><b>Lead:</b></p> <p>Ribuan warga Yogyakarta dari berbagai elemen diperkirakan akan menghadiri Sidang Paripurna DPRD DIY pada Hari Senin (13/12).</p> <p><b>Body:</b></p> <p>Wacana dukungan terhadap penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur mendominasi teks.</p> <p>Dukungan ini dilakukan bukan hanya oleh masyarakat DIY tetapi juga warga di luar Yogyakarta yang berdomisili di DIY.</p> <p>Beberapa tokoh masyarakat mewakili aspirasi warga menjelaskan kekecewaannya pada sikap pemerintah pusat yang kurang memperhatikan aspirasi warga DIY yang menginginkan penetapan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p><b>Penutup:</b></p> <p>Pernyataan Yopi Kilangin selaku tokoh</p> | <p><b>Metafora:</b></p> <p>Secara sederhana dapat diartikan perumpamaan atau pengandaian.</p> <p><b>“Warga Papua yang selama ini merasa dianaktirikan pemerintah pusat terkejut karena DIY sebagai <u>‘anak sulung’</u> Negara Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat.”</b> (paragraf 17)</p> <p>Kata <i>“anak sulung”</i> ditemukan dalam teks menunjukkan arti anak pertama. Ditekankan dalam teks, yang berarti Yogyakarta merupakan cikal bakal utama terbentuknya Negara Kesatuan RI yang seharusnya diutamakan dan juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.</p> <p><b>Depiction:</b></p> <p>Secara sederhana diartikan sebagai penggambaran isu secara denotatif.</p> <p><b>“...Warga Papua yang selama ini merasa <u>dianaktirikan</u> pemerintah pusat terkejut...”</b> (Paragraf 17)</p> <p>Kata dianaktirikan merupakan penegasan</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>masyarakat adat Mimika, Papua menjadi kalimat penutup dalam menanggapi sikap pemerintah terhadap polemik RUU Keistimewaan.</p> <p><b>“Warga Papua yang selama ini merasa dianaktirikan pemerintah pusat terkejut karena DIY sebagai ‘anak sulung’ Negara Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat.”</b> (Paragraf 17)</p> <p><b>Placement:</b></p> <p>Berita ini ditempatkan di koran Kompas dalam rubrik Politik dan Hukum di halaman dua pada sub topik Keistimewaan Yogyakarta.</p> | <p>akan adanya perilaku tidak adil. Dalam hal ini menyoroti masalah ketidakadilan pemerintah pusat pada warga Papua dan keistimewaan DIY.</p> <p><b>Keywords:</b></p> <p>Dapat diartikan sebagai kata kunci yang merupakan inti dari wacana.</p> <p><b>“RUU Keistimewaan DIY jangan sampai <u>melenceng</u> dari aspirasi warga DIY dan sistem pemerintahan yang berjalan di DIY selama ini.”</b> (Paragraf 16)</p> <p>Dengan memilih kutipan Yopi Kilangin tersebut Kompas hendak mengarahkan bahwa sebaiknya keinginan pemerintah dengan warga DIY sejalan sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.</p> |
| <p><i>Frame Saliansi:</i></p> <p>Ribuan warga DIY pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang akan menghadiri sidang paripurna DPRD DIY, Senin (13/12) bertujuan agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat.</p>   |  |
| <p><b>Frame Media:</b></p> <p>Inti dari pandangan SKH Kompas adalah aspirasi masyarakat pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ini sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat.</p>   |  |



Ribuan warga dari berbagai elemen tertahuri di Jalan Malioboro, Yogyakarta, karena halaman DPRD DI Yogyakarta tidak cukup menampung massa yang ingin mengikuti sidang Rakyat. Senin (13/12).

# Yogyakarta Tentukan Sikap

Djoko Suyanto: RUU Belum Final

YOGYAKARTA, KOMPAS – Puluhan ribu warga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tumpah ruah di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Senin (13/12). Massa tidak tertampung di halaman DPRD sehingga memadati sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Warga menyaksikan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DIY yang menghasilkan keputusan mendukung dan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono (HB) dari Sri Paduka Paku Alam (PA) yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Massa datang ke DPRD DIY sejak pukul 11.00, diawali kedatangan ratusan siswa SMA Kolese

Baca Juga soal DIY HAL 2 & 22

de Brito Yogyakarta, yang berjalan kaki sekitar 4 kilometer dari sekolah mereka. Sejumlah radio swasta di Yogyakarta juga berbantuan memutar lagu "Jogja Istimewa" yang digarap Marzuki Mohammad.

Secara bergelombang, warga Yogyakarta dari berbagai elemen

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)



Lihat Juga Video "Yoga Tuntut Penetapan" di [vod.kompas.com/yogyapenetapan](http://vod.kompas.com/yogyapenetapan)



Sumber: Foto: Infotek Kompas

## Sikap Politik DPRD DIY

1. Mempertahankan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah istimewa dalam bingkai dan sistem pemerintahan NKRI.
2. Mengusulkan pencisran jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY melalui mekanisme penetapan.
3. Penetapan sebagaimana yang dimaksud di atas dilakukan dengan cara menetapkan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
4. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera membentuk dan menyelesaikan undang-undang keistimewaan DIY dengan mendasarkan pada aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosiopolitik DIY.

## Poin-Poin Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta (Versi Kementerian Dalam Negeri)

1. Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur Utama dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Utama.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih oleh DPRD. Wakil Gubernur DIY diadukan.
3. Sultan tidak perlu memenuhi persyaratan calon kepala daerah dan tidak perlu mendapat dukungan 15 persen suara dari partai politik penubuhung jika ingin ikut dalam Pemilu Gubernur DIY di DPRD.
4. Bila dalam Pemilu Gubernur DIY hanya ada satu calon gubernur yaitu Sultan, maka DPRD langsung menetapkan Sultan sebagai Gubernur DIY.
5. Gubernur Utama mempunyai kewenangan, antara lain: memberikan arahan kebijakan pemerintah mengenai APBD, menetapkan peraturan daerah, mengatur kebijakan terkait pertanahan, melantik bupati/wakil kota, dan menjadi inspektur sipil.

Sumber: KOMPAS/WAHAN B PRADONO/GETIX PANDU

## Yogyakarta Tentukan Sikap

(Sambungan dari halaman 1)

berdatangan, seperti Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa DIY Ismaya, Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja), Gerakan Rakyat Mataram, Paguyuban Becak Pariwisata, dan warga dari sejumlah kabupaten/kota. Ribuan warga memadati Jalan Malioboro. Mereka meneriakkan yel-yel dukungan atas penetapan Sultan HB dan PA sebagai Gubernur-Wagub DIY.

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DIY GBPH Prabukusumo saat berorasi di depan warga menyatakan, DIY harus istimewa. Berkali-kali ia menyatakan, "Penetapan *yes*, Sultan *yes*, Paku Alam *yes*, pemilihan *no*," yang disambut warga. "Hanya yang tak tahu sejarah yang tidak menghargai DIY," ujarnya. Tidak ada kegiatan melawan hukum saat unjuk rasa berlangsung.

Ketua Gentaraja Sunyoto menuturkan, dukungan warga DIY terhadap penetapan sangat jelas. Pemerintah pusat seharusnya tak menutup mata. Jika pemerintah bersikeras mengabaikan aspirasi warga DIY, maka akan memunculkan perlawanan yang hebat.

Dukungan terhadap DIY juga akan menguat dari daerah.

Aktivitas Pasar Beringharjo di ruas Jalan Malioboro juga berhenti sehari penuh. Pedagang tak berdagang karena hadir untuk mengawal rapat paripurna. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Ujun Junaedi menuturkan, kesepakatan tak berdagang adalah keinginan pedagang. "Kami ingin berperan serta," ujarnya.

### Tanpa Partai Demokrat

Dalam Rapat Paripurna DPRD, anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) meninggalkan ruang sidang sebelum keputusan diambil. Keputusan diambil enam fraksi lain, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya. F-PD menyatakan, keistimewaan DIY final, tetapi tidak menyinggung penetapan kepala daerah DIY.

Rapat Paripurna DPRD DIY memutuskan sikap politik DPRD DIY tentang pengisian jabatan gubernur dan wagub dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Pertama, memper-

tahankan dalam bingkai dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, pengisian jabatan Gubernur dan Wagub DIY melalui mekanisme penetapan.

Ketiga, Sultan HB dan Paduka PA yang bertakhta ditetapkan sebagai gubernur dan wagub. Keempat, mendesak pemerintah dan DPR membentuk dan menyelesaikan RUU Keistimewaan DIY berdasar aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosiopolitik DIY.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menyatakan, keputusan ini akan disampaikan ke DPR. Keputusan DPRD DIY itu menindakanjuti berbagai aspirasi warga DIY yang disampaikan dan muncul di masyarakat.

Secara terpisah, Gubernur DIY Sultan HB X menyatakan, soal pemilihan atau penetapan adalah hak rakyat untuk menentukan. "Kita dengarkan dulu," katanya. Sultan HB dan Wagub DIY Paku Alam tak diundang dalam Rapat Paripurna DPRD DIY.

Sultan HB X berterima kasih terhadap keputusan DPRD DIY yang mendengarkan aspirasi masyarakat DIY. Sultan juga berterima kasih atas dukungan warga terhadap keistimewaan DIY. Namun, ia tak setuju jika jabatan

gubernur dijabat seumur hidup.

### Belum final

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, RUU Keistimewaan DIY masih belum final. Pemerintah masih mencari formulasi yang tepat. DPR juga akan menerima masukan dari masyarakat.

Yang terpenting, papar Djoko kepada pers di Jakarta, pembahasan RUU Keistimewaan DIY tak mengabaikan keutuhan NKRI, UUD 1945, dan tidak boleh mengingkari keistimewaan DIY. "Kita hormati proses demokrasi dengan baik," katanya. Aspirasi di masyarakat pasti akan ditangkap dengan baik oleh pemerintah.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan, pemerintah mengusulkan pengisian Gubernur dan Wagub DIY melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, bukan pemilihan langsung. Pengisian jabatan itu diatur dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang disusun pemerintah.

Soal unjuk rasa di Yogyakarta, Gamawan yakin tidak semua dari 3,5 juta warga DIY menolak usul pemerintah.

(RWN/PRA/WKM/ARA/  
ENG/NTA/SIE/EDN)

**“Yogyakarta Tentukan Sikap”**

| ANALISIS SELEKSI  |  |
|---|--|
| STRUKTUR SKRIPTURAL   | STRUKTUR TEMATIS   |
| <p><b>Realitas:</b></p> <p>Puluhan ribu warga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tumpah ruah memadati sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Warga DIY ini hadir untuk menyaksikan rapat paripurna DPRD Provinsi DIY yang menghasilkan keputusan mendukung dan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.</p> <p>“Penetapan <i>yes</i>, Sultan <i>yes</i>, Paku Alam <i>yes</i>, pemilihan <i>no</i>.” (Paragraf 4)</p> <p>Yel-yel itulah yang berkali-kali dikatakan saat GBPH Prabokusumo berorasi di depan warga DIY.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <p>1. Masyarakat DIY</p> | <p><b>Wacana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan awal pada wacana yaitu mengenai banyaknya warga dari berbagai elemen yang mengikuti jalannya sidang paripurna DPRD DIY di kawasan Malioboro.</li><li>2. Penjelasan mengenai Fraksi Partai Demokrat yang tidak sependapat dengan enam fraksi partai lainnya. (Paragraf 7)</li><li>3. Penjelasan mengenai sikap yang harus diambil karena pembahasan RUU Keistimewaan masih belum final.</li></ol> <p><b>Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wartawan</li></ol> <p>Dalam <i>lead</i> dipaparkan oleh wartawan bahwa puluhan warga Provinsi DIY tumpah ruah di halaman Gedung DPRD DIY, Senin (13/12) untuk menyaksikan sidang paripurna.</p> |

Dimunculkan dalam wacana ini karena warga DIY merupakan bagian representasi dalam wacana terkait dukungan terhadap keistimewaan DIY pada saat berlangsungnya sidang paripurna DPRD DIY

#### 2. Ratusan siswa SMA Kolese de Britto Yogyakarta

Dalam wacana disebutkan ratusan siswa SMA Kolese de Britto berjalan kaki sekitar 4 kilometer dari sekolah menuju kawasan Malioboro.

#### 3. Radio swasta di Yogyakarta

Dimunculkan dalam wacana karena secara bergantian memutar lagu “Jogja Istimewa” yang digarap Marzuki Mohammad pada hari pelaksanaan sidang paripurna DPRD DIY.

#### 4. Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa DIY Ismaya, Gerakan Rakyat Mataram, Paguyuban Becak Pariwisata

Beberapa paguyuban disebut diatas merupakan pelibat wacana yang secara bergelombang berdatangan untuk

#### **Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh:**

##### 1. Wartawan

Pada paragraf 7 dijelaskan oleh wartawan mengenai rapat paripurna DPRD yang diikuti oleh enam fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya. Namun, sebelum mengambil keputusan anggota Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang.

#### **Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh:**

##### 1. Sultan Hamengku Buwono X

“Kita dengarkan dulu.” (Paragraf 11)

##### 2. Djoko Suyanto

“Kita hormati proses demokrasi dengan baik.”

(Paragraf 14)

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa soal pemilihan atau penetapan adalah hak rakyat untuk menentukan. Aspirasi di masyarakat pasti akan didengar

memberikan dukungan atas penetapan HB dan PA sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

5. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya.

Fraksi-fraksi tersebut mengikuti sidang paripurna DPRD DIY dan dalam rapat tersebut anggota Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang sebelum keputusan diambil.

**Pelantun Wacana:**

1. GBPH Prabukusumo

Dalam wacana ini pelantun merupakan Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat yang mengungkapkan bahwa DIY harus tetap istimewa yang terdapat dalam pernyataannya.

**“Hanya yang tidak tau sejarah yang tidak menghargai DIY“** (Paragraf 4)

2. Sunyoto

Pelantun wacana ialah Ketua Gentajaya

dengan baik oleh pemerintah.

yang menuturkan bahwa dukungan warga DIY terhadap penetapan sudah sangat jelas.

**“Pemerintah pusat seharusnya tak menutup mata. Jika pemerintah bersikeras mengabaikan aspirasi warga DIY, maka akan memunculkan perlawanan hebat.”**

(paragraf 5)

### 3. Ujun Junaedi

Pelantun diatas merupakan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo. Mewakili para pedagang yang menghentikan aktivitasnya seharian penuh mengatakan bahwa kesepakatan pedagang adalah keinginan pedagang.

**“Kami ingin berperan serta.”** (paragraf 6)

### 4. Yoeke Indra Agung Lesmana

Sebagai Ketua DPRD DIY dalam teks ia menyatakan bahwa hasil keputusan pada sidang paripurna DPRD DIY akan disampaikan ke DPR. Seperti pernyataannya yang terdapat pada paragraph 10.

**“Keputusan DPRD DIY itu menindaklanjuti berbagai aspirasi warga DIY yang disampaikan dan muncul di**

**masyarakat.” (Paragraf 10)**

#### 5. Sultan Hamengku Buwono X

Gubernur DIY ini dalam wacana memunculkan pernyataan perihal penetapan yang merupakan hak rakyat untuk menentukan.

**“Kita dengarkan dulu.” (Paragraf 11)**

Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya terhadap keputusan DPRD DIY yang telah mendengarkan aspirasi warga DIY, namun ketidaksetujuannya juga diungkapkan terkait dengan jabatan gubernur seumur hidup.

#### 6. Djoko Suyanto

Dalam wacana ini pelantun merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

**“RUU Keistimewaan DIY belum final. Pemerintah masih mencari formulasi yang tepat. DPR juga akan menerima masukan dari masyarakat.” (Paragraf 13)**

Dalam pernyataannya ia mencoba bersikap netral dan menyerahkan keputusan mengenai RUU Keistimewaan pada sidang final di DPR. Aspirasi masyarakat pasti

ditangkap dengan baik oleh pemerintah.

#### 7. Gamawan Fauzi

Pelantun merupakan Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa pengisian jabatan itu diatur dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang disusun pemerintah. Ia juga menuturkan ketidakyakinannya pada unjuk rasa di Yogyakarta bahwa tidak semua dari 3,5 juta warga DIY menolak usul pemerintah.

*Frame* Seleksi: Dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa ribuan warga DIY dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY.

## ANALISIS SALIANSI

| STRUKTUR SINTAKSIS   | STRUKTUR RETORIS  |
|--|---|
| <p><b>Lead:</b></p> <p>Puluhan ribu warga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tumpah ruah di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Senin (13/12).</p> <p>Massa tidak tertampang di halaman DPRD sehingga memadati sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta.</p> <p><b>Body:</b></p> <p>Wacana dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mendominasi pemberitaan.</p> <p>Dukungan tidak hanya dari kaum intelektual, bahkan pedagang di kawasan Malioboro sempat menghentikan semua kegiatan selama sehari penuh demi mengawal jalannya sidang paripurna.</p> <p>Dalam rapat paripurna, hanya Partai Demokrat yang belum mempunyai keputusan mengenai sikapnya terkait penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.</p> <p>Sultan Hamengku Buwono tidak diundang dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, namun</p> | <p><b>Metafora:</b></p> <p>Secara sederhana dapat diartikan perumpamaan atau pengandaian.</p> <p><b>“Pemerintah pusat seharusnya tak <u>menutup mata.</u>”</b></p> <p>(paragraf 5)</p> <p>Kata “<i>menutup mata</i>” ditemukan dalam teks menunjukkan arti pura-pura tidak bisa melihat. Pemerintah sudah seharusnya peduli dan lebih memperhatikan aspirasi warga DIY, bukannya berpura-pura tidak tau dan tidak mau tau.</p> <p><b>Depiction:</b></p> <p>Secara sederhana diartikan sebagai penggambaran isu secara denotatif.</p> <p><b>“...pembahasan RUU Keistimewaan DIY tak mengabaikan keutuhan NKRI, UUD 1945, dan tidak boleh <u>mengingkari keistimewaan DIY.</u>”</b></p> <p>(paragraf 14)</p> <p>Kata mengingkari merupakan penegasan dari tidak menepati janji. Dalam hal ini</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>dalam pernyataannya Ia mengungkapkan bahwa perihal penetapan atau pemilihan sepenuhnya adalah hak rakyat.</p> <p><b>Penutup:</b></p> <p>Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menjadi penutup berita ini. Dituturkan mengenai usulan pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung.</p> <p>Ia juga menuturkan bahwa soal unjuk rasa di Yogyakarta tidak semua dari 3,5 juta warga DIY menolak usul pemerintah.</p> <p><b>Placement:</b></p> <p>Berita ini ditempatkan di halaman utama sebagai <i>headline</i>.</p> | <p>mengingkari ditekankan pada perumusan draf RUU Keistimewaan yang sesuai dengan UUD 1945 demi keutuhan NKRI.</p> <p><b>Visual Images:</b></p> <p>Dalam berita ini ada satu foto besar yang mendominasi teks. Tampak dalam gambar kerumunan orang memadati sepanjang jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Warga dari berbagai elemen masyarakat ini berdatangan sambil membawa spanduk sebagai suatu bentuk dukungan penetapan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>Penekanan dalam foto hendak menjelaskan bahwa aksi besar-besaran warga DIY ini merupakan suatu bentuk dukungan nyata aspirasi masyarakat yang sudah seharusnya didengarkan oleh pemerintah pusat.</p> |
| <p><i>Frame</i> Saliansi: Pemerintah sudah seharusnya peduli dan lebih memperhatikan aspirasi warga DIY.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Frame Media:</b></p> <p>Inti dari pandangan SKH Kompas yaitu pemerintah harus lebih menghargai aspirasi warga DIY, khususnya dengan aksi unjuk rasa ribuan elemen warga DIY pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.</p>  |  |

## KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

## Warga Kecewa Tanggapan Pusat

JAKARTA, KOMPAS -- Warga pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai wujud keistimewaan DIY, kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang dinilai mengabaikan aspirasi rakyat DIY. Mereka kecewa karena aksi warga DIY mendukung penetapan itu tidak dianggap cukup oleh pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri.

"Semestinya Mendagri tak komentar seperti itu. Semestinya jawabannya menyejukkan," ujar

Sukiman, Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo, di Yogyakarta, Selasa (14/12).

Mendagri Gamawan Fauzi sebelumnya menyatakan, unjuk rasa Senin lalu tidak mewakili aspirasi rakyat DIY secara keseluruhan. Ia yakin, tidak seluruh penduduk DIY, yang berjumlah 3,5 juta, sepakat dengan penetapan itu (*Kompas*, 14/12).

"Kalau pernyataannya seperti itu, artinya menentang dan tidak menerima aspirasi rakyat DIY. Jika begitu, sampai kapan pun,

kita tak akan mencapai titik temu karena pemerintah pusat menginginkan pemilihan," ungkapnya. Karena itu, rakyat DIY akan menggelar sidang rakyat untuk menetapkan Sultan Hamengku Buwono dan Paduka Paku Alam yang sedang bertakhta untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Ketua Gerakan Semesta Rakyat Jogja Sunyoto menilai, pemerintah pusat keterlambatan jika

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

## Warga Kecewa Tanggapan Pusat

(Sambungan dari halaman 1)

mengabaikan aspirasi warga DIY yang sudah jelas diusung dan disampaikan dalam aksi besar-besaran pada Rapat Paripurna DPRD DIY. Jika aspirasi warga diabaikan, hal itu akan memancing kemarahan rakyat.

Sebaliknya, Gubernur DIY Sultan HB X meminta warga DIY menurunkan tensi dan kembali beraktivitas seperti biasa. Warga perlu menunggu dulu draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang akan diserahkan pemerintah kepada DPR, untuk selanjutnya dicermati dan dikawal bersama.

Menanggapi Mendagri, Sultan mengatakan, tidak mungkin seluruh warga DIY harus datang ke DPRD DIY untuk memberikan dukungan soal penetapan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DIY Ahmad Su-

miyanto menilai, pengambilan keputusan di pusat yang tidak sesuai harapan sebagian besar warga DIY akan menghadirkan disharmoni yang mengganggu jalannya pemerintahan pusat dan daerah. Ini akan merugikan rakyat DIY.

Secara terpisah, seniman dari beragam bidang seni se-DIY akan mewujudkan dukungan terhadap keistimewaan DIY dengan pentas di Taman Budaya Yogyakarta. Koordinator Forum Komunikasi Seniman DIY Bondan Nusantara mengatakan, pementasan mendukung penetapan itu akan berlangsung Kamis besok.

## Keputusan Indonesia

Di Padang, Mendagri Gamawan Fauzi, Selasa, mengingatkan, soal status DIY dalam RUU Keistimewaan DIY, yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada Sekretariat Negara

adalah keputusan rakyat Indonesia. Keputusan mengenai hal istimewa atau khusus mesti ditanyakan lebih dulu kepada rakyat Indonesia, yang diwakili DPR. Tak bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat warga Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.

Prinsip itu sesuai amanat Pasal 18B UUD 1945. Meski ada hasil Rapat Paripurna DPRD DIY soal sikap politik dalam pengisian jabatan gubernur dan wagub, pemerintah pun bergeming.

"Keistimewaan itu diatur dengan undang-undang, bukan perda (peraturan daerah). Jika ingin membuat perda, tanya rakyat Yogyakarta. Tetapi dengan undang-undang, tanya rakyat Indonesia," kata Gamawan.

Ia berharap Sekretariat Negara segera menyerahkan RUU Keistimewaan DIY itu kepada DPR, dekat dengan posisi pemerintah

tersebut, yakni untuk jabatan gubernur melalui pemilihan. Namun, sejumlah keistimewaan tetap diberikan.

"Walau dipilih, jika Sultan maju dan berpasangan dengan Paku Alam, akan langsung dikukuhkan. Kedua, kerabat lain tak boleh maju. Saingannya hanya yang diusulkan parpol," katanya. Gamawan menambahkan, seandainya usulan pemerintah melalui RUU Keistimewaan DIY itu ditolak DPR, pemerintah tak akan mempersoalkannya. Hal itu adalah konsekuensi demokrasi.

Secara terpisah, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Jakarta menyatakan, RUU Keistimewaan DIY tinggal menunggu surat dari Presiden untuk diserahkan kepada DPR. Sultan HB dan Paku Alam diusulkan menempati posisi di atas kepala daerah.

(RWN/WKM/NTA/INO)

**“Warga Kecewa Tanggapan Pusat”**

| <b>ANALISIS SELEKSI</b>  |  |
|--|--|
| <b>STRUKTUR SKRIPTURAL</b>   | <b>STRUKTUR TEMATIS</b>  |
| <p><b>Realitas:</b></p> <p>Warga pendukung penentapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY kecewa dengan sikap pemerintah pusat terutama dengan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>“Keputusan mengenai hal istimewa atau khusus mesti ditanyakan lebih dulu kepada rakyat Indonesia, yang diwakili DPRD. Tak bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat warga Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.” (Paragraf 10)</p> <p>Kekecewaan warga semakin dikuatkan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri pada paragraf 12.</p> <p>“Keistimewaan itu diatur oleh undang-undang, bukan perda (peraturan daerah). Jika ingin</p> | <p><b>Wacana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan awal dari wacana ini merupakan ungkapan kekecewaan terhadap sikap pemerintah.</li><li>2. Penjelasan mengenai amanat Pasal 18 B UUD 1945 terkait keputusan mengenai hal istimewa atau khusus ditentukan oleh DPR, walaupun dalam hal ini dapat diwakili oleh DPRD.</li><li>3. Penjelasan mengenai pilihan sistematika penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY versi pemerintah (paragraf 14, paragraph 15)</li></ol> <p><b>Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sukiman (Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo)</li></ol> <p>“Semestinya jawabannya menyejukkan.” (Paragraf 2)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Sunyoto (Ketua Gerakan Semesta</li></ol> |

membuat perda, Tanya rakyat Yogyakarta. Tetapi dengan undang-undang, Tanya rakyat Indonesia.”

**Pelibat Wacana:**

6. Gamawan Fauzi

Dalam wacana ini, Gamawan Fauzi merupakan Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab menangani draf RUUK DIY.

7. Masyarakat DIY

Dimunculkan dalam wacana ini karena warga DIY merupakan bagian representasi dalam wacana terkait dukungan terhadap keistimewaan DIY yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

**Pelantun Wacana:**

1. Gamawan Fauzi

Pelantun wacana diatas merupakan Menteri Dalam Negeri yang dalam pernyataannya menanggapi aksi warga DIY dalam memberikan dukungan saat sidang paripurna DPRD tidak sepenuhnya menunjukkan kesepakatan seluruh warga DIY. Pernyataan yang mengundang kekecewaan ini terdapat

Rakyat Jogja)

“Jika aspirasi warga diabaikan, hal itu akan memancing kemarahan rakyat.” (Paragraf 5)

Dalam pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Sukiman dan Sunyoto selaku wakil masyarakat kecewa dengan pernyataan Mendagri yang seharusnya mendukung warga DIY.

**Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh:**

1. Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri)

“Tak bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat warga Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.” (Paragraf 10)

“Jika ingin membuat perda, Tanya rakyat Yogyakarta. Tetapi dengan undang-undang, tanya rakyat Indonesia.” (paragraf 12)

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan ketentuan amanat dalam UUD 1945 pada Pasal 18B soal sikap politik dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berdasar keputusan sidang DPRD tetapi berdasarkan keputusan final pemerintah dalam sidang DPR.

pada paragraf 3:

**“Unjuk rasa Senin lalu (13/ 12) tidak mewakili aspirasi rakyat DIY, yang berjumlah 3, 5 juta, sepakat dengan penetapan itu.”**

Ia juga mengatakan bahwa keputusan final tetap ditentukan oleh pemerintah bukan diwakili oleh sidang DPRD.

**“Soal status DIY dalam RUU Keistimewaan DIY, yang diserahkan Kementrian Dalam Negeri kepada Sekretariat Negara adalah keputusan rakyat Indonesia. Keputusan mengenai hal istimewa atau khusus mesti ditanyakan lebih dulu kepada rakyat Indonesia, yang diwakili DPRD. Tak bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat warga Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.”**  
(Paragraf 10)

2.Sukiman

Dalam wacana ini, pelantun diatas merupakan Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo di Yogyakarta yang menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri:

**Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh:**

1.Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri)  
“Walau dipilih, jika Sultan maju dan berpasangan dengan Paku Alam, akan langsung dikukuhkan.” (paragraf 14)

2.Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan HAM)  
“Sultan HB dan Paku Alam diusulkan menempati posisi di atas kepala daerah.” (paragraf 15)

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa perumusan draf RUUK DIY tidak sepenuhnya mengampusti aspirasi warga DIY. Sejumlah keistimewaan tetap diberikan termasuk diantaranya pengukuhan secara langsung walau konsep utamanya tetap pemilihan.

**“Semestinya Mendagri tak komentar seperti itu. Semestinya jawabannya menyejukkan.”**

(paragraf 2)

Bahkan ia pun pesimis dan meragukan konsep demokrasi yang ditawarkan pemerintah tidak merepresentasikan aspirasi rakyat DIY.

**“Kalau pernyataannya seperti itu, artinya menentang dan tidak menerima aspirasi rakyat DIY. Jika begitu, sampai kapan pun, kita tak akan mencapai titik temu karena pemerintah pusat menginginkan pemilihan.”** (paragraf 4)

3.Sunyoto

Pelantun wacana merupakan Ketua Gerakan Semesta Rakyat Jogja yang menyatakan sikap pemerintah justru akan memancing kemarahan rakyat.

**“Pemerintah pusat keterlaluhan jika mengabaikan aspirasi warga DIY yang sudah jelas diusung dan disampaikan dalam aksi besar-besaran pada Rapat Paripurna DPRD DIY. Jika aspirasi warga diabaikan, hal itu akan memancing kemarahan rakyat.”** (paragraf 5)

#### 4.Sri Sultan HB X

Dalam wacana diatas pelantun merupakan Gubernur DIY yang bertindak sebagai mediator masyarakat dengan pemerintah terkait rencana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam draf RUUK DIY.

**“Warga DIY diminta menurunkan tensi dan beraktifitas seperti biasa. Warga perlu menunggu dulu draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang akan diserahkan kepada DPR, untuk selanjutnya dicermati dan dikawal bersama.”** (paragraf 6)

#### 5.Ahmad Sumiyanto

Pelantun wacana merupakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DIY menyesalkan sikap pemerintah pusat yang justru akan menimbulkan jurang pemisah antara pemerintah

pusat dan daerah.

**“Pengambilan keputusan di pusat yang tidak sesuai harapan sebagian besar warga DIY akan menghadirkan disharmoni yang mengganggu jalannya pemerintahan pusat dan daerah. Ini akan merugikan rakyat**

**DIY.”** (paragraf 8)

6. Wartawan

Dalam wacana wartawan memberi penilaian bahwa pemerintah pusat seolah mengabaikan aspirasi masyarakat Yogyakarta. (Paragraf 1)

**“Keputusan mengenai hal istimewa atau khusus mesti ditanyakan lebih dulu kepada rakyat Indonesia, yang diwakili DPRD. Tak bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat warga Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.”** (Paragraf 10)

*Frame* Seleksi: Warga DIY kecewa atas pernyataan Mendagri yang menilai aksi unjuk rasa warga belum cukup dapat mempengaruhi keputusan final terkait hak istimewa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

## ANALISIS SALIANSI

| STRUKTUR SINTAKSIS  | STRUKTUR RETORIS  |
|---|---|
| <p><b>Lead:</b></p> <p>Warga pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY kecewa dengan sikap pemerintah yang menganggap bahwa aksi warga DIY pendukung penetapan tidak dianggap cukup oleh pemerintah terutama oleh Menteri Dalam Negeri.</p> <p><b>Body:</b></p> <p>Wacana kekecewaan mendominasi pemberitaan pernyataan Mendagri terkait pernyataannya yang dinilai mengabaikan aspirasi rakyat DIY.</p> <p>Mendagri menganggap bahwa aksi unjuk rasa warga DIY tidak cukup dijadikan bukti dukungan penetapan karena tidak seluruh masyarakat DIY yang berjumlah 3,5 juta sepakat dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.</p> <p>Dalam pernyataannya dijelaskan, keistimewaan diatur oleh Undang-Undang dan bukan oleh peraturan daerah. Sehingga keputusan ada ditangan DPR sebagai pembentuk dan perancang Undang-Undang, bukan DPRD yang tidak memiliki andil</p> | <p><b>Metafora:</b></p> <p>Secara sederhana dapat diartikan perumpamaan atau pengandaian.</p> <p><b>“Pemerintah pusat <u>keterlalu</u>an jika mengabaikan aspirasi masyarakat DIY yang sudah jelas diusung dan disampaikan dalam aksi besar-besaran pada rapat paripurna DPRD DIY.</b></p> <p>(paragraf 5)</p> <p>Kata “<i>keterlalu</i>an” ditemukan dalam teks menunjukkan arti mengecewakan atau bereaksi tidak seharusnya. Ditekankan lagi bahwa demo besar-besaran sebagai wujud dukungan yang dilakukan warga DIY bila diabaikan dapat memancing amarah rakyat.</p> <p><b>Catchphrases:</b></p> <p>Diartikan sebagai frase yang menarik atau menonjol dalam sebuah wacana.</p> <p><b>“Semestinya Mendagri tak komentar seperti itu. Semestinya jawabannya <u>menyejukkan.</u>”</b></p> <p>(paragraf 2)</p> <p>Dalam pernyataannya Gamawan Fauzi</p> |

terhadap pembentukan Undang-Undang Keistimewaan tetapi peraturan daerah.

**Penutup:**

Pernyataan Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM menjadi sebuah kalimat penutup dalam menanggapi pernyataan Mendagri terkait sistematika pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

**“RUU Keistimewaan DIY tinggal menunggu surat dari Presiden untuk diserahkan kepada DPR. Sultan HB dan Paku Alam diusulkan menempati posisi di atas kepala daerah.”** (paragraf 15)

**Placement:**

Berita ini ditempatkan di koran Kompas dalam rubrik Politik dan Hukum di halaman dua pada sub topik Keistimewaan Yogyakarta.

dituding memberi reaksi yang kurang enak didengar. Seperti halnya menentang dan kurang dapat menghargai serta menerima aspirasi warga Yogyakarta.

**Depiction:**

Secara sederhana diartikan sebagai penggambaran isu secara denotatif.

**“...warga DIY akan menghadirkan disharmoni yang mengganggu jalannya pemerintah pusat dan daerah.”** (paragraf 8)

Kata disharmoni merupakan penegasan dari tidak harmonis atau tidak berjalan seimbang. Dalam hal ini ketidakharmonisan menyoroiti pengambilan keputusan di pusat tidak sesuai keinginan masyarakat DIY yang menginginkan penetapan kepala daerah.

**Keywords:**

Dapat diartikan sebagai kata kunci yang merupakan inti dari wacana.

**“Warga perlu menunggu dulu...untuk selanjutnya dicermati dan dikawal bersama.”** (paragraf 6)

Dengan memilih kutipan kalimat Sultan HB, Kompas hendak menekankan bahwa

|   |  |
|---|--|
|   | <p>warga DIY tidak perlu terpancing emosi dan untuk perkembangan RUUK DIY warga DIY diminta lebih cermat dengan mengawasi secara bersama-sama.</p> |
| <p><i>Frame</i> Saliansi: Aspirasi masyarakat kurang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Meski demikian, warga DIY diminta untuk tidak terpancing emosi dan mengabaikan pernyataan Mendagri. Warga diminta menunggu sampai keputusan final perumusan RUU Keistimewaan diserahkan ke DPR.</p> <p><b>“Warga DIY diminta menurunkan tensi dan beraktifitas seperti biasa.”</b> (paragraf 6)</p> <p><b>“RUUK tinggal menunggu surat dari Presiden untuk diserahkan ke DPR.”</b> (Paragraf 15)</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b><i>Frame Media:</i></b></p> <p>Inti dari pandangan SKH Kompas adalah warga DIY tidak perlu terpancing emosi atas pernyataan Mendagri dan diminta bersabar menunggu draf RUU Keistimewaan sampai final.</p>  |  |

## KEISTIMEWAAN DIY

# Yogyakarta yang Panaskan Paripurna

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Ja'far Hafshah menyambut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi begitu keluar dari ruang sidang paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Ia menjabat tangan dan memeluk Gamawan sambil memintanya untuk bersabar.

Gamawan datang untuk mengikuti sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Persidangan itu berakhir menegangkan karena Gamawan tak diizinkan memberikan penjelasan tentang RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sempat dipertanyakan anggota DPR.

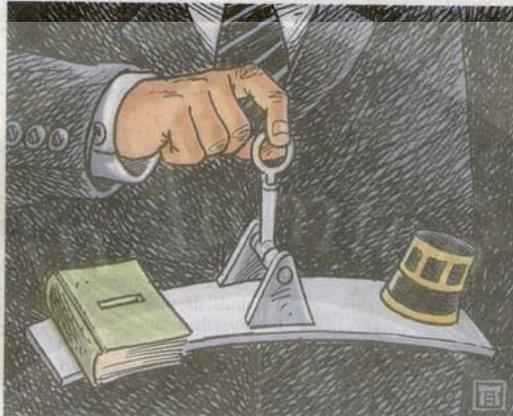
Seusai membacakan pidato tanggapan pemerintah atas pengesahan revisi UU Papol, Gamawan meminta waktu untuk menjelaskan soal RUU Keistimewaan DIY yang menjadi polemik beberapa pekan terakhir. Baru saja Gamawan bicara, pemimpin sidang, Wakil Ketua DPR Pramono Anung W. menanggapi. Kader PDI-P itu mencoba memberikan pengertian kepada Mendagri, agenda paripurna adalah mengesahkan revisi UU Papol. Penjelasan mengenai RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di forum lain.

Gamawan bersikukuh untuk menjelaskan masalah RUU Keistimewaan DIY di depan Sidang Paripurna DPR karena pada awal rapat ada yang mempertanyakannya. Sebelumnya anggota Fraksi PDI-P, Aria Bima, mempertanyakan sikap Mendagri terkait masalah DIY.

Wakil Ketua Komisi VI itu mengajukan interupsi saat sidang paripurna baru dibuka. Ia menganggap Mendagri terlalu latah, memberikan reaksi berlebihan terkait RUU Keistimewaan DIY. Gamawan juga dianggap tidak peka terhadap keinginan rakyat Yogyakarta.

"Saya kecewa dengan pernyataan Anda yang mengatakan sidang rakyat hanya diikuti sebagian kecil rakyat Yogyakarta," katanya.

Mendagri pernah mengungkapkan, sidang rakyat yang digelar di DPRD DIY tidak diikuti oleh seluruh masyarakat DIY, yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang. Pernyataan itu disampaikan Mendagri seusai



mengikuti rapat pleno di Komisi II DPR hari Senin lalu.

Meski pemimpin sidang menolak, Gamawan tetap berusaha menjelaskan masalah RUU Keistimewaan DIY. "Saya perlu menanggapi pernyataan Saudara Aria Bima," katanya. Ia mempertanyakan mengapa tak diberi kesempatan untuk menjelaskan. "Ini forum demokratis. Alangkah tidak adilnya, mereka boleh bicara, tetapi saya tidak boleh menanggapi. Kalau saya tidak boleh menyampaikan, itu artinya ada diskriminasi," ujar Mendagri dengan nada tinggi.

Suasana bertambah tegang karena terdengar letupan suara yang meminta Gamawan turun dari podium. Beberapa anggota DPR pun kembali mengajukan interupsi, tetapi ditolak pemimpin sidang. Pramono mencoba menengahi dan meminta Mendagri kembali ke tempatnya untuk kemudian menutup sidang.

### Rumit

Rupanya begitu rumit menjelaskan tentang RUU Keistimewaan DIY. Sudah hampir tiga minggu ini Mendagri sibuk menjelaskan RUU itu. Dalam satu hari, ia bisa menjelaskan lebih dari dua kali kepada wartawan yang mencegatnya.

Pertanyaan yang dilontarkan kepada Mendagri seputar pemilihan Gubernur DIY. Hampir setiap hari Mendagri menjelaskan isi draf RUU Keistimewaan DIY. Di sisi lain, banyak pihak yang mengomentari usulan pemerintah. Sebagian besar menolak usulan pemerintah.

Draf RUU Keistimewaan DIY dari pemerintah mengusulkan Gubernur DIY dipilih melalui

DPRD, yang memicu warga Yogyakarta menggelar sidang rakyat mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paduka Paku Alam, yang sedang bertakhta, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Peristiwa dalam Sidang Paripurna DPR memang membuat Mendagri kesal. "Saya meminta waktu bicara, dibilang *over-acting*. Malang betul nasib pemerintah ini. Dia yang menghujat tak dikatakan *overacting*. Ini tidak pantas, kami bukan tersangka, kalau ada beda pendapat, sah-sah saja," kata Mendagri di ruang kerjanya, Kamis.

Gamawan menyayangkan banyaknya orang yang berkomentar sebelum membaca draf RUU Keistimewaan DIY. "Banyak yang menyalahkan pemerintah. Padahal, menjelaskan saja belum. Presiden tak pernah menyalahkan siapa pun. Kami menghargai pendapat mereka. Seharusnya kami juga dihargai," ujarnya.

Gamawan menjelaskan panjang lebar tentang latar belakang penyusunan RUU Keistimewaan DIY. "Ini tugas kami sebagai pemerintah. Jika selama ini saya bicara, itu untuk menyosialisasikan draf RUU. Seharusnya bukan sekarang diskusinya, tetapi nanti kalau sudah di DPR," ungkapnya lagi.

Satu hal yang ditekankan Gamawan, RUU Keistimewaan DIY diajukan ke DPR saat ini karena masuk Program Legislasi Nasional 2010. "Ini sudah bulan Desember sehingga kami harus segera menyerahkan kepada DPR," paparnya.

(SUSIE BERINDRA/  
ANITA YOSSIHARA)

Jumat, 17 Desember 2010

**“Yogyakarta yang Panaskan Paripurna”**

| ANALISIS SELEKSI   |   |
|--|---|
| STRUKTUR SKRIPTURAL  | STRUKTUR TEMATIS  |
| <p><b>Realitas:</b></p> <p>Gamawan Fauzi tidak diijinkan memberikan penjelasan terkait pernyataannya tentang RUU Keistimewaan DIY yang sempat dipertanyakan anggota pada saat sidang paripurna, Kamis (16/12).</p> <p>Mendagri pernah menyatakan bahwa sidang rakyat yang digelar di DPRD DIY tidak diikuti oleh seluruh masyarakat DIY, yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang. (Paragraf 7)</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ja'far Hafsah (Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat)</li> </ol> <p>Dimunculkan dalam wacana ini karena pelibat menemui Mendagri se usai sidang dan memintanya untuk lebih bersabar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aria Bima (anggota Fraksi PDI-P)</li> </ol> <p>Dalam wacana ini, Aria Bima merupakan</p> | <p><b>Wacana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wacana tentang sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.</li> <li>2. Penjelasan mengenai penolakan pemimpin sidang saat Gamawan Fauzi berusaha menjelaskan masalah RUU Keistimewaan DIY. (Paragraf 2, Paragraf 3)</li> <li>3. Wacana diatas memuat ungkapan kekecewaan Gamawan Fauzi yang hendak menjelaskan tentang RUU Keistimewaan DIY. (Paragraf 8, Paragraf 13, Paragraf 14, Paragraf 15)</li> </ol> <p><b>Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wartawan</li> </ol> <p>Dalam pernyataannya memuat agenda politik yang dilakukan oleh Mendagri.</p> |

anggota partai yang mempertanyakan sikap Mendagri terkait masalah DIY.

**Pelantun Wacana:**

1. Gamawan Fauzi

Pelantun di atas merupakan Menteri Dalam Negeri. Dalam pernyataannya ia mempertanyakan tidak adanya kesempatan dalam menjelaskan masalah RUU Keistimewaan DIY.

**“Ini forum demokratis. Alangkah tidak adilnya, mereka boleh bicara, tetapi saya tidak boleh menanggapi. Kalau saya tidak boleh menyampaikan, itu artinya ada diskriminasi.”** (Paragraf 8)

2. Pramono Anung

Dalam wacana ini pelantun diatas merupakan Wakil Ketua DPR yang mengatakan bahwa agenda paripurna adalah mengesahkan revisi UU Parpol. Dikatakan bahwa menurutnya, penjelasan mengenai RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di forum lain.

**“Saya kecewa dengan pernyataan Anda yang mengatakan sidang rakyat hanya**

**Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh:**

1. Pramono Anung (Wakil Ketua DPR yang juga Kader PDI-P)

Yang mengatakan bahwa agenda paripurna adalah mengesahkan revisi UU Parpol.

“Penjelasan mengenai RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di forum lain.” (paragraf 3)

**Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh:**

1. Gamawan Fauzi

“Saya perlu menanggapi pernyataan Saudara Aria Bima.” (Paragraf 8)

Gamawan Fauzi bersikukuh menjelaskan masalah RUU Keistimewaan DIY di sidang paripurna karena pada awal rapat, Aria Bima anggota Fraksi PDI-P sempat mempertanyakan.

“Banyak yang menyalahkan pemerintah. Padahal, menjelaskan saja belum. Presiden tak pernah menyalahkan siapapun. Kami menghargai pendapat mereka. Seharusnya kami juga dihargai.” (Paragraf 14)

|  |   |
|--|---|
| <p><b>diikuti sebagian kecil rakyat Yogyakarta.”</b> (Paragraf 5)</p> <p>Ia menganggap Mendagri memberikan reaksi terlalu berlebihan terkait keistimewaan DIY.</p>   | <p>“Ini tugas kami sebagai pemerintah. Jika selama ini saya bicara, itu untuk menyosialisasikan draf RUU. Seharusnya bukan sekarang, tetapi nanti kalau sudah di DPR.” (Paragraf 15)</p> <p>Dalam pernyataan-pernyataannya Mendagri menegaskan bahwa selama ini banyak yang menyalahkan dan kurang menghargai usaha pemerintah. Padahal Mendagri hanya menjalankan tugas sebagai penanggung jawab dalam penyusunan draf RUU Keistimewaan DIY.</p> |
| <p><i>Frame</i> Seleksi: Mendagri menyatakan kekecewaannya karena tidak diperbolehkan memberikan klarifikasi tanggapan pernyataannya mengenai RUU Keistimewaan DIY.</p> <p><b>“...Kalau saya tidak boleh menyampaikan, itu artinya ada diskriminasi.”</b> (Paragraf 8)</p> <p><b>“Agenda paripurna adalah mengesahkan revisi UU Papol...Penjelasan mengenai RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di forum lain.”</b> (Paragraf 3)</p> |   |

## ANALISIS SALIANSI

| STRUKTUR SINTAKSIS   | STRUKTUR RETORIS   |
|--|--|
| <p><b>Lead:</b></p> <p>Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Ja'far Hafsah menjabat tangan dan memeluk Mendagri Gamawan Fauzi serta memintanya untuk bersabar. Hal ini dilakukan setelah Mendagri keluar dari sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).</p> <p><b>Body:</b></p> <p>Mendagri mendatangi sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.</p> <p>Seusai membaca pidato tanggapan pemerintah atas pengesahan revisi UU Parpol, Gamawan meminta waktu untuk menjelaskan soal RUU Keistimewaan DIY yang sempat ditanyakan oleh anggota Fraksi PDI-P, Aria Bima.</p> <p>Pramono Anung, Wakil Ketua DPR mencoba memberi pengertian pada Mendagri bahwa penjelasan mengenai</p> | <p><b>Metafora:</b></p> <p>Secara sederhana dapat diartikan perumpamaan atau pengandaian.</p> <p><b>“Saya meminta waktu bicara, dibilang <u>overacting</u>. Malang betul nasib pemerintah ini. Dia yang <u>menghujat</u> tidak dikatakan <u>overacting</u>.”</b> (paragraph 13)</p> <p>Kata “<i>overacting</i>” ditemukan dalam teks menunjukkan arti berlebihan. Ditekankan dalam teks, pemerintah bukan tersangka yang pantas untuk selalu disalahkan. Permasalahn perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar.</p> <p><b>Catchphrases:</b></p> <p>Diartikan sebagai frase yang menarik atau menonjol dalam sebuah wacana.</p> <p><b>“...Ia menganggap Mendagri terlalu <u>latah</u>, memberikan reaksi berlebihan terkait RUU Keistimewaan DIY.”</b></p> <p>(paragraf 5)</p> <p>Dalam pernyataannya, Pramono Anung</p> |

RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di forum lain bukan dalam forum yang bukan tempatnya.

Pramono Anung menganggap Mendagri terlalu latah dan memberikan reaksi berlebihan terkait RUU Keistimewaan DIY. Mendagri juga dianggap tidak peka terhadap keinginan rakyat Yogyakarta.

Mendagri mempertanyakan tidak adanya kesempatannya bicara. Ia menilai adanya diskriminasi karena tidak diperbolehkan untuk memberikan tanggapan.

#### **Penutup:**

Diungkapkan oleh Mendagri bahwa perumusan RUU Keistimewaan adalah tugas pemerintah dan harus segera diajukan ke DPR karena masuk Program Legislasi Nasional 2010. Sangat disayangkan apabila banyak yang sudah berkomentar sebelum membaca draf RUU Keistimewaan, bahkan menyalahkan tanpa mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Jika selama ini ia bicara, ini adalah untuk menyosialisasikan draf RUU.

menuding Mendagri bereaksi tidak wajar. Latah dikaitkan dengan berkata tanpa dipikir terlebih dahulu sehingga menimbulkan anggapan Mendagri tidak peka terhadap keinginan rakyat Yogyakarta.

#### **Depiction:**

Secara sederhana diartikan sebagai penggambaran isu secara denotatif.

**“Peristiwa dalam Sidang Paripurna memang membuat Mendagri kesal.”**  
(Paragraf 13)

Kata kesal merupakan puncak kekecewaan Mendagri karena tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai RUU Keistimewaan di sela-sela sidang paripurna. Dalam hal ini, forum yang digunakan Mendagri untuk berbicara bukan merupakan forum semestinya.

#### **Keywords:**

Dapat diartikan sebagai kata kunci yang merupakan inti dari wacana.

**“...Presiden tidak pernah menyalahkan siapa pun. Kami menghargai pendapat mereka. Seharusnya kami juga dihargai.”**

**Placement:**

Berita ini ditempatkan di koran Kompas dalam rubrik Politik dan Hukum di halaman dua pada sub topik Keistimewaan Yogyakarta.

(Paragraf 13)

Dengan memilih kutipan Mendagri tersebut Kompas hendak mengarahkan bahwa polemik antara pemerintah dengan warga DIY terkait RUU Keistimewaan sebagai perbedaan pendapat yang membutuhkan penghargaan atas pendapat satu dengan yang lainnya.

**Visual Images:**

Visual Images dalam berita ini ada satu foto. Dalam foto digambarkan sebuah neraca timbangan dengan sisi kanan mahkota Kraton Yogyakarta dan di sisi lainnya sebuah buku Undang-Undang. Neraca ini diangkat oleh tangan seorang pria berdasi yang menyimbolkan pemerintah.

Penekanan dalam foto hendak menjelaskan bahwa antara Undang-Undang versi pemerintah dengan keistimewaan yang diinginkan warga DIY masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

*Frame* Saliansi: Mendagri mengatakan dalam forum demokratis seharusnya ada kebebasan memberikan pernyataan dan menanggapi pernyataan. Permasalahan perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar.

**“Banyak yang menyalahkan pemerintah. Padahal, menjelaskan saja belum. Presiden tak pernah menyalahkan siapapun. Kami menghargai pendapat mereka. Seharusnya**

**kami juga dihargai.” (Paragraf 14)**

***Frame Media:***

Inti dari pandangan SKH Kompas adalah bahwa kekecewaan Mendagri dan warga DIY terkait RUU Keistimewaan sebagai akibat perbedaan pendapat yang kurang mendapat penghargaan satu sama lain.



## *Interview Guide*

### Interview Guide untuk Wartawan:

1. Identitas
2. Bagaimana sampai bekerja di Kompas? Sudah berapa lama bekerja di Kompas?
3. Sekarang job desknya di bidang apa?
4. Di *jobdesk* apa Anda bekerja?
5. Pedoman apa yang digunakan dalam meliput berita?
6. Kapan saja dilaksanakan rapat produksi? Apakah wartawan dilibatkan? Mekanisme penugasan peliputan bagaimana?
7. Apakah ada prosedur pemilihan narasumber? Ada hambatan ketika memperoleh narasumber?
8. Ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber berita atau pemerintah?
9. Ada pertimbangan ketika mengangkat tema mengenai pernyataan Mendagri ini?
10. Menurut Anda, aksi turun ke jalan oleh puluhan warga DIY dari berbagai elemen dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY apakah sudah dapat mewakili suara seluruh warga DIY yang menginginkan penetapan? Bagaimana tanggapan Anda mengenai warga yang setuju dengan konsep pemilihan langsung oleh pemerintah?
11. Seperti apa anda menggambarkan mengenai pertentangan masyarakat Yogyakarta dengan pemerintah khususnya Mendagri?
12. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai keinginan pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan penetapan?

13. Menurut Anda, bagaimana seharusnya masyarakat Yogyakarta bereaksi dalam menanggapi pernyataan Mendagri?
14. Apakah menurut Anda pernyataan Mendagri terkait dukungan ribuan warga dalam sidang paripurna DPRD DIY (Senin, 13/ 12) sebagai suatu pernyataan wajar? Jika tidak, bagaimana tanggapan Anda jika lantas Mendagri disalahkan karena pernyataannya seakan-akan tidak mampu menghargai aspirasi warga yang pro penetapan?
15. Bagaimana posisi Kompas pada berita tersebut? Berada di tengah-tengah atau mendukung protes masyarakat Yogyakarta?
16. Apakah berita tersebut ingin menggiring masyarakat pada pemahaman tertentu? Apakah ada arah pemberitaan? Jika ya, siapa yang menentukan arah pemberitaan?
17. Apakah Kompas mempunyai hubungan yang baik dengan Mendagri? Terkait pemberitaan ini bagaimana?

Guide line question Redaktur Pelaksana:

1. Nama dan identitas
2. Apakah ada pertimbangan dalam menugaskan wartawan untuk meliput berita?
3. Apakah wartawan dalam menulis berita selalu diarahkan sesuai dengan keinginan redaktur?
4. Apakah ada rapat redaksi sebelum terbit? Kapan dilaksanakan? Siapa saja yang terlibat?  
Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas?
5. Bagaimana menentukan narasumber? Apakah ada pertimbangan tertentu misalnya untuk menguatkan pembaca akan arah pemahaman tertentu?
6. Bagaimana menentukan ilustrasi, foto, *visual image*, apa saja yang dipertimbangkan?
7. Mana yang lebih berpengaruh, tulisan dari sudut pandang wartawan, editor, redaktur pelaksana atau garis kebijakan dari Kompas?
8. Apakah ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber berita, kelompok, organisasi komunitas tertentu atau pemerintah?
9. Menurut Anda bagaimana kedekatan hubungan institusi Kompas dengan institusi pemerintah khususnya Mendagri terkait dengan pemberitaan ini?
10. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai keinginan pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan penetapan?

11. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja Mendagri dalam menyusun draf RUU

Keistimewaan? Apakah ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya? Seperti apa?

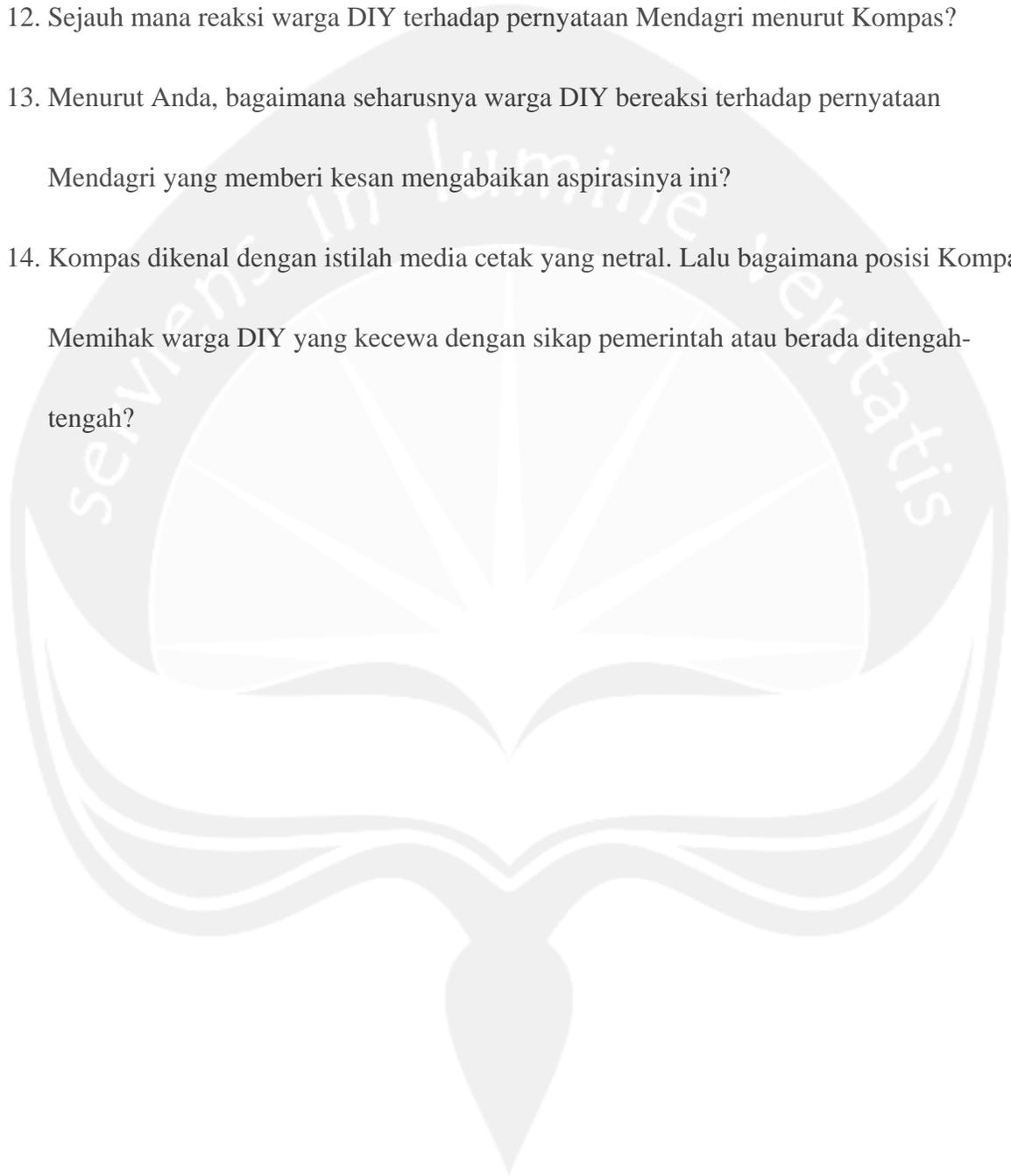
12. Sejauh mana reaksi warga DIY terhadap pernyataan Mendagri menurut Kompas?

13. Menurut Anda, bagaimana seharusnya warga DIY bereaksi terhadap pernyataan

Mendagri yang memberi kesan mengabaikan aspirasinya ini?

14. Kompas dikenal dengan istilah media cetak yang netral. Lalu bagaimana posisi Kompas?

Memihak warga DIY yang kecewa dengan sikap pemerintah atau berada ditengah-tengah?



## **TRANSKRIP WAWANCARA**

Narasumber : Bambang Sigap Sumantri (editor multimedia)

Tanggal : 20 Juli 2011

Jenis wawancara : langsung

Tempat : Kantor Kompas Gramedia Jl. Palmerah Selatan lantai 3

Durasi : 1 jam (19.00-20.00 WIB)

### **1. Identitas**

Bambang Sigap Sumantri, sebagai editor desk multimedia, dulunya sebagai kepala biro Yogyakarta.

### **2. Apakah ada pertimbangan dalam menugaskan wartawan untuk meliput berita?**

Kita punya perencanaan. Biasanya perencanaan dilakukan pagi hari, Bahan dari isu-isu yang sudah ada atau bisa berkembang di lapangan. Rapat pagi yang dihadiri semua editor, redaktur pelaksana, pimred kecuali wartawan. Lewat perencanaan, berita diarahkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di lapangan bisa berubah dan tidak seperti yg sudah diarahkan.

### **3. Apakah wartawan dalam menulis berita selalu diarahkan sesuai dengan keinginan redaktur?**

Ya tentu saja. Sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpin redaksi.

**4. Apakah ada rapat redaksi sebelum terbit? Kapan dilaksanakan? Siapa saja yang terlibat? Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas?**

Rapat redaksi pagi jam 10. Yang hadir editor, redaktur pelaksana, pimpinan redaksi, wakil pimred, wakil redpel, kecuali wartawan. Yang dibahas isi koran besok, *dibreakdown* dulu, *Mbak..* Ya agar semua editor tahu, *running newsnya* apa. Baru kemudian ditentukan akan menghubungi siapa sebagai narasumber. Kalau untuk rapat sore itu untuk menentukan apa yang direncanakan tadi pagi untuk dijadikan berita. Lalu dipilih berita yang akan dijadikan *Headline*.

**5. Bagaimana menentukan narasumber? Apakah ada pertimbangan tertentu misalnya untuk menguatkan pembaca akan arah pemahaman tertentu?**

Ya.. yang pasti yang berhubungan langsung ya, *Mbak* dengan topiknya. *Ngga waton nyomot* orang untuk diwawancara. Kalau tentang RUU Keistimewaan ya dengan Mendagri, Sultan, anggota partai. Tapi nanti di lapangan bisa berubah. Wartawan yang ada di Jogja *dikontak* langsung dari Jakarta untuk cari narasumber yang dibutuhkan.

**6. Bagaimana menentukan ilustrasi, foto, visual image, apa saja yang dipertimbangkan?**

Harus bisa memperkaya, melengkapi, lebih menjelaskan tentang berita. Kalau foto ya harus aktual. *Hmm...* untuk dokumentasinya yang diutamakan itu yang aktual, karena foto kan nilainya hampir sama dengan berita. Tapi sekarang *visual images* di Kompas

kan sudah bermacam-macam jenisnya Mbak, jadi sekarang bisa melalui video. Namanya *Video on Demand*. Kalau dilembar halaman biasanya bentuknya itu *barcode*. Wartawan disini diharuskan bisa mengoperasikan kamera, *begitu Mbak*.

**7. Mana yang lebih berpengaruh, tulisan dari sudut pandang wartawan, editor, redaktur pelaksana atau garis kebijakan dari Kompas?**

Ya.. yang paling berpengaruh itu sudut pandang pemimpin redaksi. Ia nanti yang mengarahkan mau berita seperti apa.

**8. Apakah ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber berita, kelompok, organisasi komunitas tertentu atau pemerintah?**

*Nggak* ada. Kita *kan* menyediakan hak jawab

**9. Menurut Anda bagaimana kedekatan hubungan institusi Kompas dengan institusi pemerintah khususnya Mendagri terkait dengan pemberitaan ini?**

Tidak ada kedekatan, ya biasa aja *gitu Mbak*. Mendagri dipandang sebagai menteri saja.

**10. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai keinginan pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan penetapan?**

Banyak faktor yang menyebabkan begitu. Sebenarnya di Jogja sendiri, kalau kita petakan tidak semua orang juga menginginkan penetapan *lho, Mbak*. Kalau kita lihat Jogja lebih heterogen, lebih dinamis. Yang penetapan ya karena sedang vocal. keistimewaan Yogyakarta. Itu sejak masa Wubernur DIY pertama muncul wacana *begitu*.

**11. Jadi wacana pemilihan Gubernur memang sudah diskema sedemikian rupa oleh pemerintah ya Pak?**

Ya.. sebenarnya itu ada keinginan pusat juga untuk menyamakan Jogja dengan provinsi lain. *Kan* koridor pemerintah itu negara republik yang tidak lagi mengakui adanya keistimewaan seperti di Jogja. Ini sejak kemerdekaan sudah diperjuangkan keistimewaan itu, pemerintah sudah sejak dulu ingin meniadakan Ada wacana pemilihan ini kan karena penetapan sudah tidak ada lagi dalam pikiran pemerintah pusat, sudah terskema pemilihan. Ya, jelas supaya tidak menimbulkan kecemburuan dengan daerah lain.

**12. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja Mendagri dalam menyusun draf RUU Keistimewaan? Apakah ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya? Seperti apa?**

Hmm.. ya ini karena presiden juga mengalami kebingungan juga. Jika melihat isu Jogja ini, bisa lihat mencerminkan keseluruhan kepemimpinan kita. Tidak jelas maunya induk kita ini maunya seperti apa. Menteri menjadi meraba-raba jadi seperti menganalisis. Bukan lantas jadi langsung *main tuding* menyalahkan mendagri. Ia sendiri tidak punya pegangan. Cari aman *kan* ngikutin atasannya. Atasan A ya ikut A, B ya ikut B. Dari pada kalau bikin masalah malah kena KPK. Hehehehe

**13. Sejauh mana reaksi warga DIY terhadap pernyataan Mendagri menurut Kompas?**

Kalau reaksi warga ya ada benarnya juga. Sebenarnya yang dipertanyakan apakah warga yang tidak datang di DPRD DIY apakah tetap satu suara. Itu tetap problematis. Logikanya kan pernyataan mendagri itu ada benarnya juga. Karena tidak semua hadir di DPRD DIY. *Nah* sekarang, apakah bisa dipastikan yang datang itu dibuktikan satu suara? Ya, masing-masing penuh dengan pengandaian *sih*, Mbak. Pengandaian yang bekerja di ranah politik jadi menimbulkan asumsi-asumsi.

**14. Menurut Anda, bagaimana seharusnya warga DIY bereaksi terhadap pernyataan Mendagri yang memberi kesan mengabaikan aspirasinya ini?**

Segala sesuatunya dalam hal ini perumusan draf dilakukan di Jakarta, jadi ketika memutuskan itu tidak bisa langsung dirasakan dampaknya. Jadi *kesannya* seperti mengabaikan aspirasi. Kalau di Jogja itu kan faktor sejarah masih ada, jadi sudah pasti

adanya keterlibatan emosional. Warga jogja bereaksi itu sifatnya lebih ekspresif bukan anarkis, ini ya sebagai bentuk luapan emosi dan kekecewaan. Pada dasarnya Jogja itu *ngga* ada sejarah anarkis *kok*, Mbak Secara objektif ini ada peran Sultan. Tetapi sayangnya peran Sultan yang seperti ini tidak memanfaatkan sebagai momentum. Sultan itu kan tidak pernah otoriter, contohnya kasus Ambarukmo Plaza tetap berjalan walau sudah mendapat kritik dari manapun. Sayangnya sikap seperti ini tidak dijadikan bekal untuk menyatu dengan rakyat. Jogja itu modal sosialnya besar sekali lho.. Modal sultan itu juga banyak.

**15. Jadi menurut Bapak dalam hal ini Sultan berpengaruh?**

Ya tentu saja. Sekarang mengapa pemerintah pusat seperti tidak mendengar suara jogja? Ya karena pemerintah masih ada unsur bingungnya. Seperti aceh itu contohnya sampai angkat senjata. *Lha* di Jogja *kan* tidak, antara Sultan dan rakyatnya sendiri tidak *kempel*, tidak satu. Sultan *kok malah manut*. Suara Jogja juga *kan* sudah bulat. Bukan tidak mungkin jika suara Jogja bersatu padu akan didengarkan dan dianggap berarti oleh pemerintah pusat.

**16. Apakah Sultan kurang mau berjuang untuk rakyat Jogja sendiri? Lalu bagaimana seharusnya Sultan bersikap?**

Ya, baiknya pemerintah daerah itu memperjuangkan permintaan dari masyarakat. Kalau suara utuh, dan ada persatuan masyarakat Jogja, akan lebih cepat untuk menekan pemerintah pusat.

Selama ini saya rasa perjuangan rakyat Jogja itu lemah. Mengapa pemerintah seperti tidak memperhatikan aspirasi masyarakat? Ya itu tadi, karena perjalanan menyatukan aspirasi itu masih susah. Coba bersatu betul-betul, penetapan akan lebih mudah.

Saya yakin kalau sultan ini berani artinya menunjukkan keteguhannya dibelakang rakyat Jogja, saya kira lain. Walaupun secara posisi politis Ia lemah, tapi apabila dia tidak pakai baju politik akan lebih mudah maju membela kepentingan Jogja.

**17. Kompas dikenal dengan istilah media cetak yang netral. Lalu bagaimana posisi Kompas? Memihak warga DIY yang kecewa dengan sikap pemerintah atau berada ditengah-tengah?**

Kompas adalah media massa yang melaksanakan fungsi sosial kontrol. Posisi Kompas mengingatkan pemerintah agar selalu bertindak fair kepada masyarakat termasuk kepada daerah, masyarakat dan pemerintah DIY. Dalam isu keistimewaan Yogyakarta, sikap Kompas selalu mengingatkan kepada pemerintah supaya berjalan pada alur yang tidak bias karena politik golongan atau dendam pribadi.

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

Narasumber : Mawar Kusuma Wulan Kuncara Manik (Wartawan)

Tanggal : 20 Juni 2011

Jenis wawancara : via *email*

### **1. Identitas**

Mawar Kusuma Wulan Kuncara Manik. 30 tahun.

### **2. Bagaimana sampai bekerja di Kompas? Sudah berapa lama bekerja di Kompas?**

Suka menulis. Sebelumnya sempat kerja di Tempo (4 tahun) sebelum pindah Kompas.

### **3. Di *jobdesk* apa Anda bekerja?**

Penulis untuk Kompas minggu.

### **4. Pedoman apa yang digunakan dalam meliput berita?**

Kode etik jurnalistik. Kemenarikan dan pentingnya berita.

### **5. Kapan saja dilaksanakan rapat produksi? Apakah wartawan dilibatkan? Mekanisme penugasan peliputan bagaimana?**

Rapat desk Kompas minggu dilakukan satu pekan sekali tiap Jumat sore. Wartawan wajib ikut. Biasanya usulan tulisan datang dari wartawan dan redaktur untuk kemudian dibahas di rapat sebelum kemudian diputuskan untuk ditulis.

Rapat wartawan di desk lain seperti ekonomi, politik dll diadakan tiap sore hari. Berita

yang diperoleh wartawan dikumpulkan lalu dibahas mana yang layak cetak sekaligus penentuan tulisan HL. Masing-masing kepala desk kemudian akan membawa berita yang menarik di desk nya untuk diusulkan pemuatan di halaman depan di rapat para redaktur yang juga berlangsung tiap sore hari.

**6. Bagaimanakah alur produksi berita di Kompas? Apakah berbeda tiap jobdesk bidangnya?**

Ketika masih ada halaman khusus Yogyakarta, seluruh berita yang dikumpulkan wartawan dibicarakan dalam rapat sore. Berita yang menarik tapi tak layak dimuat di Kompas nasional akan dimuat di lembar DIY. Berita yang layak untuk diterbitkan di Kompas nasional akan diusulkan ke rapat di Jakarta untuk penyetujuan diterbitkan atau tidak.

Setelah halaman Yogyakarta tidak ada. Semua berita dari daerah langsung masuk ke desk nusantara di Jakarta. Dari rapat sore di desk nusantara, berita dari daerah yang layak untuk lembar politik atau ekonomi atau olahraga atau humaniora akan dikirim ke masing-masing desk tersebut. Mayoritas berita daerah dimuat di halaman nusantara. Banyak juga berita yang diusulkan wartawan dari daerah yang tidak termuat. Untuk diketahui, wartawan Kompas tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wartawan di Jakarta juga disebar lagi ke masing-masing desk. Wartawan menulis sesuai desk-nya. Jadi wartawan olahraga tidak akan menulis untuk politik demikian sebaliknya.

**7. Apakah ada prosedur pemilihan narasumber? Ada hambatan ketika memperoleh narasumber?**

Narasumber yang dipilih ya yang harus kompeten untuk berita yang ditulis. Biasanya memang ada beberapa narasumber yang meminta sebagian informasi tidak ditulis atau *off the record*. Tapi itu hak narasumber sehingga tidak menjadi hambatan. Toh, kalau satu narasumber enggan ngomong, kita bisa cari narasumber lain.

**8. Ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber berita atau pemerintah?**

Kalau mendikte berita, ya tentu saja tidak. Paling narasumber seperti pemerintah dan yang lainnya akan membaca tulisan kita dan akan protes jika ada yang tidak sesuai dengan hasil wawancara. Protes bisa dilayangkan melalui surat pembaca untuk ralat berita dan Kompas tidak anti memberitakan ralat jika ada berita yang memang salah.

**9. Ada pertimbangan ketika mengangkat tema mengenai pernyataan Mendagri ini?**

Komentar mendagri sengaja dicari untuk mengomentari gerakan turun ke jalan rakyat Yogyakarta terkait keistimewaan. Pernyataan Mendagri diperlukan agar tulisan tidak sekadar dari sisi rakyat Yogyakarta sehingga bisa cover all side. Dengan adanya pernyataan dari mendagri, rakyat DIY juga bisa menakar tanggapan pemerintah pusat atas apa yang mereka lakukan. Sebagai wartawan, tulisan cover all side ini diharapkan bisa jadi jembatan pemerintah-rakyat untuk titik terang bagi masalah keistimewaan DIY yang berlarut-larut.

**10. Menurut Anda, aksi turun ke jalan oleh puluhan warga DIY dari berbagai elemen dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY apakah sudah dapat mewakili suara seluruh warga DIY yang menginginkan penetapan? Bagaimana**

**tanggapan Anda mengenai warga yang setuju dengan konsep pemilihan langsung oleh pemerintah?**

Sudah mewakili suara warga yang mendukung penetapan. Keterwakilan suara mayoritas pendukung penetapan antara lain tercermin dari banyaknya warga yang turut turun ke jalan dan keputusan sidang DPRD DIY yang mayoritas fraksinya mendukung penetapan. Perbedaan pendapat adalah wajar. Jadi wajar saja ada sebagian masyarakat yang setuju konsep pemilihan langsung yang ditawarkan pemerintah.

**11. Seperti apa anda menggambarkan mengenai pertentangan masyarakat**

**Yogyakarta dengan pemerintah khususnya menanggapi pernyataan Mendagri?**

Kala itu, rakyat Yogyakarta pro penetapan ya pastinya marah dan kecewa karena aspirasi mereka tidak didengar oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat tetap yakin dengan pandangannya sendiri bahwa pemilihan lebih sesuai dengan mekanisme demokrasi.

**12. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai**

**keinginan pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan penetapan?**

Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Tapi kedaulatan harus tetap di tangan rakyat sehingga apapun keputusan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan warga DIY yang menginginkan pemilihan ataupun warga DIY yang menginginkan penetapan. Dan tentu saja juga mempertimbangkan keinginan masyarakat Indonesia

karena DIY bagian dari Indonesia. Untuk itu perlunya draf RUUK dibahas di DPR yang katanya merupakan representasi rakyat.

13. **Menurut Anda, bagaimana seharusnya masyarakat Yogyakarta bereaksi dalam menanggapi pernyataan Mendagri?**

Reaksi warga DIY kala itu menurutku wajar. Yang penting emosinya kan tidak sampai anarkis.

14. **Apakah menurut Anda pernyataan Mendagri terkait dukungan ribuan warga dalam sidang paripurna DPRD DIY (Senin, 13/ 12) sebagai suatu pernyataan wajar? Jika tidak, bagaimana tanggapan Anda jika lantas Mendagri disalahkan karena pernyataannya seakan-akan tidak mampu menghargai aspirasi warga yang pro penetapan?**

Keinginan pemerintah pusat sebenarnya sudah jelas. Baca saja ya *dik* draft yang dikirim menteri dalam negeri ke DPR. Menteri kan pembantu Presiden jadi ya tidak akan menyimpang dari sikap presiden. Mendagri disalahkan karena tidak menghargai suara rakyat Yogyakarta. seharusnya tidak ceplas ceplos karena akan melukai hati.

15. **Bagaimana posisi Kompas pada berita tersebut? Berada di tengah-tengah atau mendukung protes masyarakat Yogyakarta?**

Sesuai kaidah jurnalisme, Kompas ada di tengah. Menyuarakan suara rakyat DIY di satu sisi dan di sisi lain memberi ruang bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan pandangannya. Beberapa kali Kompas juga menggelar sarasehan tentang keistimewaan yang digelar di DIY maupun Jakarta. Sarasehan tersebut mempertemukan pemerintah,

rakyat pro pemilihan, dan pro penetapan. Intinya Kompas ingin menjadi katalisator mempercepat penyelesaian masalah terkait keistimewaan tanpa harus ikut terlibat menjadi pro atau kontra.

**16. Apakah berita tersebut ingin menggiring masyarakat pada pemahaman tertentu? Apakah ada arah pemberitaan? Jika ya, siapa yang menentukan arah pemberitaan?**

Kami lebih ingin memaparkan fakta. Terkait nasib keistimewaan yang berlarut-larut, Kompas juga mencoba mendorong agar segera terselesaikan dengan peng-undangan RUUK. Selain dengan tulisan, ya dengan sarasehan tadi. Apakah nanti hasilnya pemilihan atau penetapan, setidaknya ada kepastian bagi DIY dan tidak terjadi anarkisme atau kekerasan. Yang pasti Kompas tidak akan mengadu domba dan tetap memomorsatukan kesatuan NKRI sekaligus mengingatkan pemerintah tentang PR masalah DIY.

**17. Apakah Kompas mempunyai hubungan yang baik dengan Mendagri? Terkait pemberitaan ini bagaimana?**

Kompas berhubungan baik dengan semua narasumber. Tidak ada complain dari Mendagri terkait pemberitaan Kompas.

WALIKOTA HATI NURANE RAKYAT

# SEJARAH ORGANISASI DAN VISI-MISI



Buka mata dengan



## SEJARAH, ORGANISASI DAN VISI-MISI KOMPAS

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tujuan instruksional | : pemahaman sejarah, organisasi dan visi – misi Kompas |
| Sarana pelajaran     | : makalah, film company profil                         |
| Waktu                | : 90 menit.  |

### Sejarah / Latar Belakang

#### 1. Lahirnya Intisari

Pada tahun 1960-an Petrus Kanisius Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama sering bertemu dalam gerakan asimilasi. Kedua-duanya punya latar belakang guru, dan punya minat dalam bidang sejarah. PK. Ojong adalah Pemimpin Redaksi *Star Weekly*, sedangkan Jakob Oetama Pemimpin Redaksi majalah *Penabur*. Mereka berbincang-bincang, bahwa pada waktu itu pembaca Indonesia terkucil karena tidak ada majalah luar negeri yang diperkenankan masuk. Keadaan seperti itu tentunya tidak sehat. Muncul ide membuat majalah untuk menerobos isolasi itu.

Intisari adalah awal dari kerjasama PK. Ojong dengan Jakob Oetama. Disebut Sang Pemula karena memang kemudian menjadi awal (pemula) dari Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yang awalnya berkembang dari multiple media sebagai *core business*, tetapi kemudian berkembang menjadi *multibusiness group of companies* yang terdiri atas *related diversification* dan *unrelated diversification*.

Untuk memperoleh ijin terbit bagi majalah Intisari, PK. Ojong dan Jakob Oetama pergi ke gedung Kodam (Komando Daerah Militer) di jalan Perwara, Jakarta. Jakob Oetama masih ingat, ia masuk sendirian, sementara PK. Ojong menunggu dalam mobil Opel Caravan-nya yang diparkir jauh-jauh. Jakob mendapat kesan mantan Pemimpin Redaksi *Star Weekly* yang lebih tua 12 tahun itu orang yang cermat dan tidak setengah-setengah. "semua disiapkan dan dilaksanakan dengan teliti".

Majalah Intisari terbit 7 Agustus 1963 dengan 22 artikel, tiras pertama 10.000 eksemplar habis terjual, hitam putih dan telanjang, tidak dibalut kulit muka. Ukurannya kecil, 14 X 17,5 cm dan tebalnya 128 halaman. Drs. Jakob Oetama menjadi pemimpin redaksinya. Nama PK. Ojong dan Adi Subrata tidak tercantum sebagai pengasuh. Mereka menulis seakan-akan penulis luar. Penulis-penulis luar diantaranya Nugroho Notosusanto ("orang Jakarta di London"); Soe Hok Djie ("Beberapa hari di Ubud"); Soe Hok Gie ("Pengalaman lucu pelukis Nashar"); Kapten dr. Ben Mboi menceritakan pengalamannya diterjunkan dan hidup bergerilya di belantara Irian Barat dalam rangka Trikora, Tan Liang Tie wartawan olah raga sejak *Star Weekly* menulis Zatopek atlet pelari dari Cekoslowakia yang diserahi melatih atlet Indonesia menghadapi Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*). Nama-nama lain, diantaranya: Muhamad Ali, Siswadi, Ajip Rosidi dan Rijono Pratikto.

#### 2. Kondisi Politik Sekitar Tahun 1965

Suhu politik di Indonesia memanas menjelang tahun 1965 ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan kegiatan sepihak, bahkan menyuarakan perlunya dibentuk angkatan kelima untuk menghadapi alat-alat keamanan negara yang sah, ABRI. Dengan dalih *landreform* PKI melakukan penyerobotan tanah milik negara. Aksi serupa ini dilukiskan oleh "Harian Rakyat" sebagai adil dan patriotik.

Suatu hari awal tahun 1965, Letjen Ahmad Yani (1922-1965) selaku Menteri/Panglima TNI-AD mencalon rekannya sekabinet, Drs. Frans Seda. Yani melemparkan ide menerbitkan koran melawan pers komunis. Frans Seda menanggapi ide itu, membicarakan dengan Ignatius Josef Kasimo (1900-1986) – sesama rekan di Partai Katolik – dan dengan rekannya yang memimpin majalah Intisari, Petrus Kanisius Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama.

PK. Ojong dan Jakob Oetama kemudian menggarap ide tersebut dan mempersiapkan penerbitan koran. Semula nama yang dipilih "Bentara Rakyat", penggunaan nama itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembela rakyat yang sebenarnya bukanlah PKI. Dalam keperluan dinas Frans Seda sebagai Menteri Perkebunan (1964-1966) menghadap presiden di Istana Merdeka, Soekarno telah mendengar bahwa Seda akan menerbitkan sebuah koran lalu menyarankan nama "Kompas", *pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba..* Maka jadilah nama harian Kompas hingga saat ini, sementara nama Yayasan Bentara Rakyat sebagai penerbit harian Kompas. Para pendiri Yayasan Bentara Rakyat adalah para pemimpin organisasi Katolik seperti : Partai Katolik, Wanita Katolik, PMKRI, dan PK. Ojong, Pengurus yayasan terdiri dari Ketua : I.J. Kasimo, Wakil Ketua: Drs. Frans Seda, Penulis I : F.C. Palaunsuka, Penulis II : Jakob Oetama, dan Bendahara :PK. Ojong.

Walaupun restu dari Presiden Soekarno, berkat dari Mgr. Soegijapranoto, dan bantuan pimpinan Angkatan Darat, proses izin terbit mengalami kesulitan. PKI dan kakitangannya "menguasai" aparat, khususnya Departemen Penerangan Pusat dan daerah. PKI tidak mentolerir sebuah harian yang akan menjadi saingan berat. Tahap demi tahap rintangan dapat diatasi, pusat memberi ijin prinsip namun harus dikonfirmasi ke Daerah Militer V Jaya. Persyaratan terakhir untuk dapat terbit, harus ada bukti 3.000 (tiga ribu) orang pelanggan. Frans Seda punya inisiatif mengumpulkan tanda tangan anggota partai, guru sekolah, anggota-anggota koperasi Kopra Primer di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur. Dalam waktu singkat daftar 3.000 pelanggan lengkap dengan alamat dan tanda tangan terkumpul. Bagian perijinan Puskodam V Jaya menyerah dan mengeluarkan ijin terbit. Pers PKI yang melihat kehadiran "Kompas" bereaksi keras, bahkan mulai menghasut masyarakat dengan mengartikan "Kompas" sebagai "Komando Pastor".

### 3. Kompas: Lahir 28 Juni 1965

Minggu, 27 Juni 1965, sekitar tengah malam jalan Kramat Raya sudah sepi. Pertunjukkan terakhir bioskop Rivoli juga telah berakhir, dan penonton beberapa jam lalu berhamburan pulang. Tinggal beberapa becak yang masih mangkal di malam yang dingin itu. Tidak jauh dari situ kegiatan percetakan PN Eka Grafika (dahulu Percetakan Abadi) baru mulai, beberapa orang berkumpul mengelilingi mesin cetak Duplex. PK. Ojong (alm), Jakob Oetama serta beberapa wartawan Theodorus Purba (alm), Tinon Prabawa (alm), Tan See Sing (Indra Gunawan), Eduard Liem (Edward Linggar), Roestam Affandi, Djoni Lambangdjaja, August Parengkuan, dan Harthanto (alm). Mereka nampak tidak sabar dan was-was, diantara mereka sebentar-sebentar melihat arlojinya mirip sebuah penantian lahirnya bayi pertama. Wartawatnya, Erka Muchsin (alm) dan Threes Susilastuti (alm) menanti penuh harap di rumah.

Di sudut lain, duduk di kursi menghadap meja korektor adalah Kang Hok Djin, Kang Tiau Liang, Dj.Pamoedji, Dimiyati, Marjono, dan Petrus Hutabarat. Ketika koran pertama Kompas muncul dari mesin cetak, tepuk tangan menyambutnya. Diiringi kilatan lampu kilat dari kamera Sudardja (wartawan foto majalah Penabur),

suasana seketika menjadi berubah. Harian Kompas lahir tanggal 28 Juni 1965 dengan motto "Amanat Hati Nurani Rakyat" itu, keesokan harinya mulai dipasarkan. Kompas pertama terbit empat halaman. Kompas edisi pertama memasang sebelas berita luar negeri dan tujuh berita dalam negeri di halaman pertama. Berita utama di halaman satu ketika itu berjudul "KAA Ditunda Empat Bulan". Pojok Kompas di kanan bawah mulai memperkenalkan diri, "Mari ikat hati. Mulai hari ini, Dengan, .... Mang Usil". Di halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama : Pemimpin Redaksi Drs. Jakob Oetama, Staf Redaksi : Drs. J. Adisubrata, Lie Hwat Nio SH, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, Eduard Liem.

Sementara istilah Tajuk Rencana ketika itu belum ada, namun halaman II ada lahirnya Kompas, tajuk surat kabar ini. Di halaman II pula terdapat antara lain berita luar negeri dan dua berita dalam negeri. Ditambah tiga artikel, satu diantaranya menyangkut luar negeri. Di halaman ini ada kolom hiburan Senyum Simpul. Halaman III ketika itu antara lain berisi tiga artikel, satu diantaranya mengenai luar negeri. Ada pula alasan mengenai penyakit ayan dari Dr. Kompas. Sedangkan halaman IV antara lain berita dan artikel luar negeri dua dan satu dalam negeri. Di halaman ini hanya tercatat dua berita olahraga, satu diantaranya mengenai "Persiapan Team PSSI ke Pyongyang". Waktu itu iklan masih kurang dari separuh halaman. Dari enam iklan, satu diantaranya dari redaksi Kompas tentang "Permintaan menjadi langganan Kompas". Iklan paling besar dan bergambar hanya satu, yaitu obat batuk dan cacingan.

Kedua perintis Kompas setiap saat terjun langsung ke bawah. Mereka berusaha agar dari hari ke hari mutu Kompas kian baik. Karena itu, setelah sebulan di cetak di Eka Grafika, harian ini kemudian dicetak di Percetakan Masa Merdeka Jl. Sangaji, Jakarta. Percetakan ini memang lebih baik. Meskipun sistem settingnya masih cetak timbul, namun percetakannya sendiri sudah menggunakan mesin rotasi. Karena itu, laya cetaknya lebih cepat. Dan memang semenjak itulah oplag Kompas naik dari semula 4.800 eksemplar di masa Eka Grafika, melonjak menjadi 8.003 eksemplar. Pada tanggal 26 Juni 1967 oplag Kompas 30.650 eksemplar. Tepat setahun kemudian, tanggal 26 Juni 1968 menjadi 44.400. Ini berarti penambahan tiap bulan pukul rata 1.146 eksemplar. Pada tanggal 26 Juni 1969 (ketika harian ini membuka sebuah stand di Jakarta Fair) oplagnya meningkat menjadi 63.747 eksemplar. Tepat 26 Juni 1970 batas 80.000 telah dilewati. Tepatnya oplag Kompas telah mencapai 80.412 eksemplar. Dari jumlah itu, kira-kira 31.000 beredar di Jakarta saja. Ini berarti hampir 40%. Selebihnya (60%) tersebar di luar Jakarta, di seluruh Nusantara. Pola ini, menandakan bahwa Kompas menjadi harian nasional dan bukan harian lokal atau koran daerah, sudah ternyata sejak semula dan bertahan terus sampai kini. Setelah tahun 1980-an oplag Kompas mengalami perkembangan pesat, misalnya 600.000 tahun 1986 selama sebulan. Sekarang rata-rata 500.000 eksemplar (Senin-Jumat), sekitar 600.000 di hari Sabtu-Minggu. Oplag terbesar dicapai pada waktu ulang tahun Bung Karno ke 100 tahun dengan oplag 750.000 eksemplar dalam edisi khusus.

#### 4. VISI DAN MISI KOMPAS

Moto "Amanat Hati Nurani Rakyat:" di bawah logo Kompas, menggambarkan visi dan misi bagi disuarakannya hati nurani rakyat. Kompas ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Ingin

berkembang sebagai "Indonesia mini", karena Kompas sendiri adalah lembaga yang terbuka, kolektif, luhur, ikhlas serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Kompas ingin mencompakan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok. Rumusan bakunya adalah "humanisme transcendental". "Kata Hati Mata Hati", pepatah yang kemudian ditemukan, menegaskan semangat empathy dan compassion Kompas.

#### 4.1. Visi Kompas

"Menjadi Institusi Yang Memberikan Pencerahan Bagi Perkembangan Masyarakat Indonesia Yang Demokratis Dan Bermartabat, Serta Menjunjung Tinggi Asas Dan Nilai Kemanusiaan"

Dalam kiprahnya dalam industri pers "Visi Kompas" berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru, berdasarkan Panca Sila melalui prinsip humanisme transcendental (persatuan dalam perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur. Secara lebih spesifik bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka
- b. Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi.
- c. Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok.
- d. Kompas adalah Koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa.
- e. Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan.

#### 4.2. Misi Kompas

"Mengantisipasi Dan Merespon Dinamika Masyarakat Secara Profesional, Sekaligus Memberi Arah Perubahan ( *Trend Setter* ) Dengan Menyediakan Dan Menyebarkan Informasi Terpercaya".

Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha diantara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dijabarkan dalam 5 sasaran operasional:

- a. Kompas memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri : cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna.
- b. Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya nuansa kehidupan dan kemanusiaan.
- c. Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi tetap kritis dan teguh pada prinsip.
- d. Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan meningkatkan tiras.

- e. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi Kompas harus memperoleh keuntungan dari usaha. Namun keuntungan yang dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menunjang kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan.

#### 4.3. Nilai-nilai Dasar Kompas

Seluruh kegiatan dan keputusan harus berdasarkan dan mengikuti nilai-nilai sebagai berikut:

1. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya
2. Mengutamakan watak baik
3. Profesionalisme
4. Semangat kerja tim
5. Berorientasi pada kepuasan konsumen ( pembaca, pengiklan, mitra kerja – penerima proses selanjutnya )
6. Tanggung jawab sosial
7. Selanjutnya, kita bertingkah laku mengikuti nilai-nilai tersebut, dengan begitu kita akan memberikan jasa yang memuaskan bagi pelanggan.

##### Nilai-nilai Dasar Kompas

###### **Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya**

Menghargai ide, pendapat dan saran orang lain.

Memberikan *feedback* yang membangun secara obyektif pada saat yang tepat.

Memberi dukungan atau tidak menghalangi orang lain untuk maju mencapai cita-citanya, serta dalam melakukan pekerjaannya dengan sempurna.

Bersikap tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan gender.

Menerima secara wajar adanya perbedaan pangkat, jabatan dan senioritas.

Tidak mencampuri masalah-masalah pribadi orang lain yang menyangkut hak asasinya.

Bersikap adil terhadap mitra kerja.

Peduli terhadap kepentingan orang lain.

Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang berdasarkan kemampuannya masing-masing.

Tidak mengganggu suasana dan ketenangan bekerja.

Bersikap obyektif tanpa prasangka kepada prestasi atau hasil karya semua orang.

Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencoba ide baru dan tidak menghakimi apabila terjadi kegagalan.

###### **Mengutamakan watak baik**

Selalu bersyukur rahmat Tuhan.

Bertingkah laku jujur, tidak menerima suap atau komisi, tidak korup, tidak kolusi dan nepotisme

Tidak berpihak dan tidak memihak.  
Bertingkah laku yang pantas sesuai dengan perannya (*good profile*)  
Tidak tinggi hati, congkak, iri, dengki, sirik, menfitnah dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar.  
Saling membantu dan menghormati.  
Bertindak disiplin dan rajin.  
Bersikap saling terbuka.  
Berkomitmen terhadap lembaga dan profesi.  
Bersikap solider atau setia kawan.  
Bersikap bijak dan prudent.  
Seimbang dalam menggunakan pikiran dan perasaan.  
Bertingkah laku yang sesuai dengan etika dan sopan.  
Tulus dan ikhlas dalam memaafkan kesalahan/lekeliruan orang lain.  
Bertingkah laku sesuai dengan perkataannya.  
Bertanggung jawab terhadap segala tindakannya.  
Berani mengakui kesalahannya sendiri dan menunjukkan kesalahan orang lain.  
Tidak membocorkan dan menyebarkan rahasia perusahaan.  
Tidak memanipulasi segala tindakan, data, laporan, dll.

#### **Profesionalisme**

Memiliki kompetensi, baik dalam hal kepemimpinan atau manajerial maupun teknis yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.  
Bertanggung jawab pada tugasnya.  
Memiliki tingkat intelektualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaannya dan memiliki wawasan luas yang terkait dengan pekerjaannya.  
Berdedikasi pada profesi.  
Melakukan perbaikan kinerja atau diri dan mengembangkan potensinya secara terus menerus.  
Etos kerja yang tuntas (tidak berkerja setengah-setengah).  
Berpikir dan bertindak kreatif, inovatif, taktis dan memiliki inisiatif.  
Bersikap adil, obyektif dan berimbang.  
Memiliki integritas.  
Dapat membedakan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi.  
Menjalankan etika bisnis sesuai dengan bidangnya masing-masing.  
Bekerja secara sistematis sesuai dengan standar pekerjaannya.  
Bertindak proaktif dalam mengantisipasi kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaannya.  
Mengutamakan mencari inti permasalahannya dan menyelesaikannya terlebih dahulu, jangan mengutamakan mencari siapa yang bersalah atau menyalahkan orang lain.  
Mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar (efektif dan efisien).  
Mengutamakan pelaksanaan tindakan nyata (*get things done*).  
Berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak (*win-win solution*)  
Berkomunikasi secara asertif dan responsif (tidak hanya mengutamakan haknya sendiri dengan mengesampingkan hak pihak lain), tidak secara agresif (hanya mengutamakan haknya sendiri) dan submisif (haknya sendiri disalahkan pihak lain).

#### **Semangat kerja tim.**

Bekerja secara gotong royong.

Menjaga kemistri dan keharmonisan dalam pekerjaan.  
Mengutamakan kepentingan yang lebih besar, tidak individualis maupun sektoral.  
Peduli dengan persoalan orang lain.  
Bekerja sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya masing-masing.  
Melibatkan orang lain dalam proses bekerja bersama.  
Bekerja bersama-sama sehingga menghasilkan sinergi.  
Bersaing dengan sehat.  
Mendukung sportifitas dalam bekerja sama.  
Menghindari unsur-unsur favorit terhadap salah satu orang atau bagian.  
Tidak hanya mengutamakan hasil kerja, tetapi juga mengutamakan proses dalam bekerja sama.  
Mendorong setiap orang untuk mengungkapkan ketidak beresan baik dalam bagiannya maupun dalam lingkaran yang lebih besar lagi.  
Bekerja secara institusionalisasi jangan personalisasi.  
Menghindari ketergantungan pekerjaan pada individu tertentu.  
Mendukung secara konsekuen dan konsisten keputusan yang telah diambil.  
Mendorong setiap orang untuk mengungkapkan segala sesuatu secara terbuka dan menghentikan segala isu-isu yang tidak baik.  
Menumbuhkan sikap saling mempercayai satu dengan yang lain.

**Berorientasi pada kepuasan konsumen ( pembaca, pengiklan, mitra kerja – penerima proses selanjutnya )**  
Menangani keluhan konsumen secara cepat dan tuntas.  
Memberikan pelayanan yang sempurna dari sudut pandang konsumen (*service excellence*).  
Memberikan keramahan dalam melayani konsumen.  
Melakukan pengamatan dan perbandingan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan oleh pesaing.  
Mendengarkan (jangan beramsumsi) dan merespon kebutuhan konsumen.  
Menyediakan produk maupun pelayanan sesuai kebutuhan.  
Memenuhi kepuasan konsumen adalah tanggung jawab setiap orang di dalam organisasi.

**Tanggung jawab sosial.**  
Peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain.  
Menjaga citra perusahaan (tidak bertindak kriminal atau merugikan orang lain)  
Mendukung kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.  
Mendorong setiap orang untuk berperan secara aktif dalam membantu masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

## 5. Struktur Organisasi KOMPAS

PT. Kompas Media Nusantara adalah lembaga media massa, pemimpin tertinggi adalah Pemimpin Umum, Pemimpin Umum dibantu oleh Wakil Pemimpin Umum Bidang Non Bisnis dan Wakil Pemimpin Umum Bidang Bisnis, lalu ada Pemimpin Redaksi yang bertanggung jawab bidang redaksi, dan Pemimpin Perusahaan yang bertanggung jawab bidang bisnis. Di bawah Pemimpin Redaksi ada Redaktur Pelaksana dan di bawahnya terdapat Kepala Desk, Kepala Biro dan paling bawah adalah reporter. Di bidang bisnis, di bawah Pemimpin Perusahaan ada General Manajer Iklan dan General Sirkulasi, dan General Manajer *marketing communication*. Di antara dua bidang itu, ada bagian Penelitian dan Pengembangan, Direktorat SDM-Umum, dan Teknologi Informasi. Mereka sifatnya *supporting* dan di bawah supervisi Wakil Pemimpin Umum non bisnis, sementara untuk Pemimpin Perusahaan disupervisi Wakil Pemimpin Umum bidang bisnis.

Pembagian dalam Struktur Organisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan pembagian sistem kerja. "Produk" Kompas yang dihasilkan itu merupakan hasil kerja sinergis dari unit-unit yang ada dalam struktur organisasi. Produk Kompas adalah Koran dan berita. Adapun tahap manajemen produk itu adalah sebagai berikut:

### 5.1. Bidang Redaksi

#### 1). Perencanaan

Dilaksanakan rapat pagi dalam merencanakan berita yang akan dimuat, berdasarkan:

- a. Adanya undangan acara yang diterima Kompas.
- b. Peliputan berita yang ditetapkan di tiap-tiap desk.
- c. Penetapan *event* tertentu, dimana dalam upaya perarian berita disesuaikan dengan aktualitas peristiwa yang terjadi.

#### 2). Pengorganisasian

Redaktur mengkoordinasikan wartawan-wartawan untuk mencari dan menulis berita sesuai dengan yang direncanakan dalam rapat pagi dan menunjuk wartawannya untuk mengerjakan tugas-tugas pencarian berita tersebut.

#### 3). Pelaksanaan

Dilaksanakan rapat sore untuk menetapkan berita yang akan dimuat dalam surat kabar (dalam bentuk yang belum jadi) dan membuat *head line* berita. Apabila data belum akurat maka akan ditambah atau dicari lagi. Setelah data berita akurat, berita disunting oleh desk sunting. Setelah disetujui, kemudian akan disunting dalam bentuk lay out Koran untuk dicetak. *Dead line* ditetapkan pukul 23.00. Percetakan dimulai pukul 01.00. Pencetakan sesuai dengan jumlah oplag.

#### 4). Pengevaluasian

Dilakukan evaluasi di tiap-tiap desk/bidang redaktur, selain mengevaluasi berdasarkan masukan dari pembaca yang menelepon atau mengirimkan fax/email. Evaluasi akan

dibahas pula dalam rapat Rabu (rapat mingguan) sebagai dasar perencanaan yang juga akan dibahas dalam rapat pagi. Evaluasi dilihat dari segi:

- Pencetakan susunan huruf dan kata-kata
- Bentuk dan susunan berita pada setiap halaman.
- Isi beritanya

Sumber berita lain selain wartawan dari penulis-penulis dan berbagai kantor berita. Kompas dikenal dengan keunggulan dari segi penulisan opini. Penulis opini Kompas, misalnya : Kwik Kian Gie, Mudji Sutrisno, Arief Budiman, Zuhairi Misrawi, Muhtadin AR, Aloysius Budi Nugroho, Herry Tjahjono dll. Pembagian berita: berita daerah, berita luar negeri, berita dalam negeri, berita olahraga dll.

## 5.2. Direktorat SDM-Umum

Hubungan kerja dan iklim dalam lingkungan mikro Kompas, yaitu: hubungan antar personal, sehari-harinya terjalin hubungan kekeluargaan, terbuka dan tidak kaku. Dalam hal kerja dan urusan administrasi terjadi hubungan formal, berjenjang untuk menunjukkan fungsi kerja.

Promosi atau kenaikan pangkat karyawan berdasarkan: Penilaian dari sikap dan hasil kerja karyawan tersebut, jika dinilai cukup baik diberikan bahan dan dilatih agar naik jabatannya. Sebelumnya, karyawan tersebut mengahami prajabatan 6 bulan sampai 1 tahun. Jika karyawan itu tidak menunjukkan hasil kerja yang baik, maka tidak jadi naik pangkat. Pergangkatan manajer, jarang dilakukan oleh pihak luar, lebih sering dilakukan pihak dalam. Akhir-akhir ini bidang bisnis mulai mencoba dari luar (*head hunting*).

Peningkatan produktivitas karyawan dilakukan dengan cara: menerima wartawan dengan pendidikan sarjana bidang apa saja, kemudian dididik selama 1 tahun. Adanya orientasi karyawan baru mengenai visi, misi dan sejarah Kompas. Pelatihan Kepribadian. Pelatihan Bahasa Inggris, Pelatihan yang meningkatkan kemampuan (skill) dan manajemen. Diadakan rekreasi pada bidang masing-masing, setiap 2 tahun sekali. Pemberian cuti dan tunjangan. Selain gaji pokok, diberikan uang transport, uang makan, bonus, THR. Kenaikan gaji karyawan berdasarkan inflasi ekonomi atau prestasi kerja yang baik, dengan penilaian karya.

Tujuan/sasaran manajemen adalah: memberikan informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, isi pemberitaan bersifat netral dan universal.

Direktorat SDM-Umum dipimpin oleh seorang Direktur, dan dibawahnya ada empat manajer yang memimpin bidang Umum, Penerimaan & Penempatan, Remunerasi (Kesejahteraan), Pendidikan & Pelatihan.

1). Bidang Umum, berkewajiban menyediakan sarana & prasarana untuk setiap karyawan, agar mendapatkan kenyamanan dalam melakukan tugasnya. Ruang kerja yang memadai dan peralatan kerja disediakan oleh perusahaan.

2). Bidang Penerimaan dan Penempatan, unit yang merekrut calon karyawan dan menempatkan di unit sesuai dengan bidang dan keahliannya. Perkembangan dari calon karyawan sampai pensiun menjadi tanggung jawab dari bidang Penerimaan dan Penempatan.

3). Bidang Kesejahteraan (Remunerasi), adalah unit yang mengurus kesejahteraan karyawan misalnya: tunjangan perumahan, cuti, sekolah, dokter, obat, rumah sakit dll.

4) Pendidikan & Pelatihan, unit yang mendidik & mempersiapkan calon karyawan untuk memasuki dunia kerja di bidangnya. Training untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia atau karyawan menjadi tanggung jawab dari unit ini.

### 5.3. Bidang Penelitian & Pengembangan

Kepala Penelitian dan Pengembangan yang kedudukannya sejajar dengan Pemimpin Redaksi (Pemred), bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin Umum Harian Kompas. Kepala Litbang membawahi 4 bidang yang mempunyai kedudukan sejajar, yaitu:

#### 1). Pusat Informasi Kompas (PIK)

Pusat Informasi Kompas dipimpin oleh seorang Manajer membawahi tiga bagian:

- a. Bagian Akuisisi : bagian pengadaan dan perawatan bahan pustak
- b. Bagian Pengolahan Arsip Elektronik : bagian pengolahan arsip elektronik mencakup kegiatan pengolahan harian Kompas dan informasi dari sumber lain ke dalam bentuk elektronik.
- c. Bagian Layanan Informasi: bagian ini mempunyai kegiatan layanan informasi dan kegiatan sirkulasi.

Pusat Informasi Kompas merupakan satu unit/bidang yang pada dasarnya bertugas mengumpulkan, mengolah dan melakukan temu kembali informasi yang dibutuhkan. Kegiatan Pusat Informasi Kompas bukan hanya sebagai pusat dokumentasi, tetapi merupakan pusat informasi. Fungsi Pusat Informasi Kompas adalah untuk mendukung kinerja redaksi dalam menerbitkan harian Kompas, dan secara rinci mempunyai tugas:

- a. Mengembangkan koleksi baik buku, terbitan berkala dan data terolah.
- b. Mengelola arsip harian Kompas dan beberapa terbitan berkala yang dipilih berdasarkan kebutuhan redaksi ke dalam bentuk arsip elektronik.
- c. Memberikan informasi untuk internal yaitu: wartawan dan karyawan yang tergabung dalam Kelompok Kompas - Gramedia (KKG) dan melayani masyarakat umum.

#### 2). Pusat Penelitian Kompas (Puslitkom)

Pusat penelitian Kompas (Puslitkom) pimpinan seorang Manajer, bertugas menangani penelitian dari hasil kerja redaksi yang hasilnya diserahkan pada bagian redaksi. Penelitian dilakukan dengan bantuan dari mahasiswa dengan mengadakan polling terhadap pelanggan Kompas dan masyarakat umum.

#### 3). Pusat Penelitian Bisnis (Puslitbis)

Pusat Penelitian Bisnis (Puslitbis) dipimpin oleh seorang Manajer Puslitbis, menangani riset pasar / konsumen, memantau pendapat masyarakat terhadap perubahan Kompas, dan mengadakan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan Kompas. Forum Pembaca Kompas yang ditangani selama ini untuk memberi masukan / kritik tentang harian Kompas.

#### 4). Bidang Database

Updating database Kompas perlu ditangani setiap kali agar koleksi database harian Kompas selalu *up-to-date*. Bidang Database Kompas dipimpin oleh seorang manajer Database. Biodata tokoh-tokoh politik, pengusaha, artis dan orang-orang terkenal selalu di *update* sehingga datanya tetap relevan menjadi tanggung jawab dari unit ini. Database juga setiap kali memuat profil kabupaten seluruh Indonesia. Buku otonomi daerah dengan isi profil kabupaten telah terbit, dan telah menyusul buku partai Indonesia.

#### 5.4. Bidang Teknologi Informasi

Bidang paling baru dalam organisasi Kompas, ini didirikan tahun 1996 dan direstrukturisasi tahun 2003, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya teknologi informasi dengan cepat dan tepat, serta bisa memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oleh karena itu, Bidang Teknologi Informasi (TI) diarahkan untuk lebih berorientasi pada memberikan pelayanan yang tuntas (*end-to-end services*) dalam bidangnya, dan tidak hanya berorientasi pada teknologi saja. Untuk mewujudkan hal ini, maka Bidang TI membentuk tim kerja dalam melaksanakan tugasnya. Ada tim yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan jasa layanan dan ada tim yang bertanggung jawab untuk men-deliver layanan tersebut. Kedua tim ini bekerja secara proyek maupun rutin, dan didukung oleh Senior Analyst, Staf Sekretariat, Administrasi dan Gudang. Secara struktur, tim kerja ini dibangun dari tiga bidang keahlian yang dipimpin oleh seorang General Manajer, dan masing-masing bidang keahlian dipimpin oleh seorang Manajer, yaitu Software & Aplikasi, Hardware & Infrastruktur dan Helpdesk & Support.

##### 1). Software dan Aplikasi (SA)

Bidang SA diisi oleh para programmer dan system analis yang bertanggung jawab untuk membangun / mengintegrasikan software, aplikasi dan database menjadi suatu sistem informasi yang diperlukan. Pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu, mudah digunakan, bebas dari kesalahan dan *cost effective*. Untuk itu bidang SA dituntut untuk memiliki metoda kerja yang sistematis dan melaksanakan penelitian yang terarah. Bekerjasama dengan bidang lain, bidang SA memberikan dukungan tingkat lanjut bagi permasalahan software dan aplikasi, serta memastikan bahwa database perusahaan selalu dalam kondisi *up and running*.

##### 2). Hardware dan Infrastruktur (HI)

Bidang HI bertanggung jawab untuk membangun / mengintegrasikan hardware dan infrastruktur untuk menjalankan sistem informasi yang diperlukan. Para ahli hardware dan jaringan komputer serta telekomunikasi di bidang ini juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu, handal dan *cost effective*. Sama dengan Bidang SA, Bidang HI juga memberikan dukungan tingkat lanjut bagi permasalahan hardware dan infrastruktur, serta memastikan bahwa hardware dan infrastructure komputer & telekomunikasi perusahaan selalu dalam kondisi *up and running*.

##### 3). HelpDesk dan Support (HDS)

Bidang HDS merupakan ujung tombak TI dalam men-deliver layanan TI, serta menangkap kebutuhan dan kesulitan para pengguna sumber daya TI di perusahaan. Oleh karena itu secara proaktif Bidang HDS melaksanakan inventarisasi, instalasi, perawatan, perbaikan dan dukungan teknis, serta memberikan pelatihan agar sumber daya TI perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Bidang HDS tersebar ke

beberapa lokasi kerja dan masing-masing dikepalai oleh seorang Supervisor. Secara regular mereka menghadiri dan mengadakan pertemuan dengan *user*.

#### 5.4. Bidang Bisnis

Masyarakat Indonesia semakin beragam pola dan gaya hidupnya. Komunikasi massa di Indonesia semakin maju, dan jaringan informasi semakin canggih. Akibatnya, terjadi peningkatan kualitatif kebutuhan informasi. Artinya, sekarang bukan sekadar membutuhkan fakta saja, tetapi petunjuk yang lebih mengarah pada makna dari fakta itu, bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya.

Atas dasar pemikiran itu ada gagasan, dalam usaha penerbitan Kompas mulai dikembangkan pemikiran yang tidak hanya didasarkan pada orientasi produk, tetapi bergerak sampai jarak tertentu ke orientasi pasar. Artinya, dalam membuat produk ditingkatkan kesadaran dan pemikiran terhadap situasi pasar, maupun perkembangan kebutuhan konsumen mengenai informasi.

#### Fungsi Bisnis :

- Bertanggung jawab dan berkewajiban menjadikan lembaga Kompas menjadi badan usaha komersial yang sehat.
- Mengatur pendapatan dan pembiayaan kegiatan usaha, agar media sebagai produk laku terjual.
- Memantapkan agar unit bisnis dan personilnya sebagai intitusi sosial yang punya nilai ekonomis dan kemasyarakatan.
- Mengedarkan produk agar bisa dikonsumsi pada saat pembaca membutuhkannya.

#### Sumber:

1. Profil Harian *Kompas*, Database Pusat Informasi Kompas
2. "Kompasiana" oleh P.K. Ojong, Jakarta : Gramedia, 1981
3. Frans Seda, "Sepanjang jalan kenangan", *Kompas*, 28 Juni 1990, hal. IV
4. St. Sularto, *Kompas: Sahabat dalam Perubahan*, HUT Kompas ke -35
5. Orientasi Karyawan Baru, Artikel Sejarah Ringkas Kompas, PSDM Kompas.
6. Hidup Sederhana Berpikir Mulia, P.K. Ojong, Satu dari Dua Pendiri Kompas, oleh Helen Ishwara, Penerbit Buku Kompas, September 2001.

&&&&&&&

